

Melampaui Tambang

Situasi Ekonomi Berlapis Tambang Batu Bara dan
Ketergantungan Komunitas Sekitarnya:
Sebuah Laporan

Dina Septi Utami

Union Aid Abroad **APHEDA**
The global justice organisation of the Australian union movement



February 2026

Just Energy Transition in Coal Regions



Melampaui Tambang: Situasi Ekonomi Berlapis Tambang Batu bara dan Ketergantungan Komunitas Sekitarnya: Sebuah Laporan

Proyek *Innovations Regions for a Just Energy Transition* didanai bersama oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir (BMUKN) melalui Inisiatif Iklim Internasional (IKI) serta oleh Direktorat Jenderal Kemitraan Internasional Komisi Eropa (DG INTPA) untuk Platform Antar Wilayah *Just Energy Transition in Coal Regions* (JET-CR). Proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium organisasi yang dipimpin oleh GIZ sebagai Koordinator Proyek Bersama, dengan Climate Action Network (CAN), International Institute for Sustainable Development (IISD), International Labour Organisation (ILO), Wuppertal Institute für Klima, Umwelt, Energie GmbH, Solidarity Center, dan APHEDA sebagai mitra pelaksana.

IKI JET dan Platform JET-CR-nya bertujuan untuk mendukung dan mempercepat transisi energi berkeadilan dari batu bara menuju energi terbarukan dan kegiatan ekonomi berkelanjutan lainnya di Kolombia, Chili, Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Mongolia.

Just Energy Transition in Coal Regions (JET-CR) Knowledge Hub adalah platform daring yang menjembatani para ahli, pembuat kebijakan, industri batu bara, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil. Platform ini merupakan ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif, berbagi kisah nyata, serta mencari perangkat dan solusi yang efektif.

Platform ini bertujuan untuk secara khusus memperkuat suara pekerja dan masyarakat yang bergantung pada batu bara, menunjukkan bagaimana pengetahuan dapat diterapkan dalam praktik. Platform ini juga mengubah praktik menjadi pengetahuan dengan membawa pengalaman lokal ke dalam percakapan global dan memajukan keahlian dalam transisi energi berkeadilan.

Dengan menyediakan ringkasan berkala berupa artikel, makalah penelitian, berita, dan acara, platform ini berfungsi sebagai "pusat informasi terpadu" untuk menghimpun informasi terkini terkait transisi energi berkeadilan dari batu bara di seluruh dunia.

jetknowledge.org | unions4jet.org

On behalf of:



of the Federal Republic of Germany



Publikasi ini dibuat dengan dukungan finansial dari Inisiatif Iklim Internasional Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir (BMUKN) berdasarkan Perjanjian Hibah dengan GIZ. Isi publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penulisnya dan tidak serta-merta mencerminkan pandangan BMUKN maupun GIZ.

Melampaui Tambang: Situasi Ekonomi Berlapis Tambang Batu bara dan Ketergantungan Komunitas Sekitarnya: Sebuah Laporan

© 2026 Union Aid Abroad - APHEDA

Dipublikasikan oleh Just Energy Transition for Coal Regions Knowledge Hub

Publikasi ini dilisensikan di bawah [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

About Union Aid Abroad - APHEDA

Union Aid Abroad-APHEDA adalah organisasi keadilan global dari gerakan serikat pekerja Australia. Kami bekerja secara global dalam kemitraan untuk mewujudkan martabat dalam pekerjaan, keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kami berupaya mencapai hal tersebut melalui serikat pekerja dan gerakan sosial yang kuat, program pembangunan berkelanjutan, solidaritas global, serta dukungan di saat krisis.

Union Aid Abroad-APHEDA

Level 1, 365-375 Sussex St
Sydney NSW 2000
Australia

Tel: +61 (0) 2 264 9343

Website: apheda.org.au

Panduan Advokasi Transisi Energi Berkeadilan: Pengalaman serikat pekerja di tambang batu bara

May 2026

Ucapan Terima Kasih

Penulis dan Union Aid Abroad-APHEDA mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia), dan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dalam membantu dan memfasilitasi pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penulisan dokumen ini. Dukungan mereka memungkinkan kami bertemu dan berdiskusi dengan para buruh, perwakilan serikat buruh, dan anggota komunitas di seputar wilayah tambang batu bara yang terkait dengan studi dokumen ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua orang yang diwawancarai atas informasi dan waktu yang diberikan.

Ringkasan Eksekutif

Tambang batu bara masih menjadi tulang punggung ekonomi di banyak wilayah di Indonesia, bukan saja melalui pekerjaan formal, tetapi juga melalui lapangan kerja informal dan semi-informal yang terbentuk di seputar wilayah di mana tambang batu bara memproduksi. Laporan ini, **Coal mining remains the economic backbone of many regions in Indonesia, shaping not only formal employment but a vast web of informal and semi-formal livelihoods that sustain entire towns.** Laporan ini, **Melampaui Tambang: Situasi Ekonomi Berlapis Tambang Batu Bara dan Ketergantungan Komunitas di Sekitarnya**, menelisik bagaimana ekonomi yang digerakkan oleh industri batu bara berfungsi sampai ke luar wilayah tambang. Laporan ini terutama berkenaan dengan tiga wilayah: Sangatta (Kutai Timur), Tanjung Redeb (Berau), dan Rawas Ilir (Musi Rawas Utara). Melalui studi kualitatif yang melibatkan 41 orang responden serta analisa data sekunder, studi ini berusaha memetakan bagaimana buruh, penghasilan, dan sesungguhnya merata pada seluruh rantai ekonomi lokal yang bergantung pada industri batu bara.

Studi ini memperkenalkan **kerangka analisa empat lapis** yang menggambarkan struktur ekonomi di wilayah batu bara. Lapis 1 mencakup perusahaan-perusahaan tambang utama dengan kerja formal, upah yang relatif tinggi, dan jaminan sosial yang komprehensif. Lapis 2 meliputi para kontraktor dan pemasok langsung, di mana relasi kerja cenderung berdasarkan kontrak jangka pendek yang sangat bergantung pada pengoperasian tambang. Lapis 3 terdiri dari bisnis penunjang dan penyedia jasa—umumnya terdaftar secara formal namun beroperasi dengan praktek kerja informal yang menyediakan jaminan perlindungan terbatas. Lapis 4 meliputi ekonomi periferi dan informal: pedagang kecil, penyedia jasa, buruh transportasi, dan sejumlah kegiatan informal lainnya yang bergantung pada kebutuhan buruh tambang dan beroperasi di luar aturan ketenagakerjaan dan tidak terjangkau sistem jaminan sosial.

Dalam studi yang dilakukan di tiga wilayah tersebut ditemukan adanya ketergantungan ekonomi yang tinggi pada batu bara, terutama di Sangatta dan Tanjung Redeb, di mana batu bara berkontribusi besar pada nilai pendapatan daerah and menopang ekosistem bisnis lainnya. Dokumen ini menyoroti sejumlah ketimpangan pendapatan, jam kerja, dan akses jaminan sosial pada buruh yang bekerja di lapis ekonomi yang berbeda. Buruh lapis 1 secara umum mendapatkan jaminan yang baik dibanding sebagian besar buruh di lapis 2, 3, dan terutama di lapis 4. Mereka menghadapi kondisi kerja prekarius, relasi kerja informal, ketidakstabilan pendapatan, dan akses terbatas pada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan sosial lainnya. Informalitas kerja bukan saja terjadi pada usaha kecil-menengah, namun tertanam dalam berbagai spektrum relasi kerja, bahkan di perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara formal.

Temuan penting lainnya adalah bahwa sebagian besar buruh yang bergantung pada industri batu bara dan pengusaha kecil-menengah nampaknya tidak menyadari, karenanya tidak siap, untuk menghadapi potensi penutupan tambang. Diskursus dan kebijakan transisi energi berkeadilan beresiko mengabaikan komunitas buruh batu bara yang beroperasi di luar relasi kerja formal tambang. Bagi serikat buruh, situasi ini menggambarkan tantangan sekaligus kesempatan. Dokumen ini menyerukan agar serikat buruh meluaskan fokus mereka melampaui buruh lapis 1, mulai mengorganisir buruh informal dan buruh sub-kontrak, memperkuat advokasi jaminan sosial untuk semua, dan berpartisipasi sejak dini dalam perencanaan transisi yang berkeadilan.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Singkatan	viii
1.0 Pengantar	1
1.1 Latar Belakang	1
2.0 Gambaran Umum Perekonomian Lokal di Sekitar Tambang	6
2.1 Sangatta: Kehidupan di sepanjang arteri utama kota batu bara	6
2.2 Tanjung Redeb: Pusat Ekonomi Batu bara Berau dan Lanskap Sosialnya	9
2.3 Rawas Ilir: Kehidupan, Pekerjaan, dan Transisi di Kabupaten Sungai di Sumatera Selatan	13
3.0 Ketergantungan Ekonomi pada Pertambangan Batu bara	16
3.1 Hubungan Ketenagakerjaan Formal dan Informal di Sektor Pertambangan	16
3.2 Organisasi dan Perundingan Bersama	20
3.3 Jam Kerja serta Upah untuk Setiap Lapisan	21
3.4 Kesehatan Kerja dan Jaminan Sosial	24
3.5 Pendapatan Rumah Tangga dan Pola Pengeluaran	27
4. Dampak yang Diperkirakan apabila Tambang Ditutup	30
5. Kesimpulan dan Keputusan Strategis untuk Serikat Pekerja	33
5.1 Temuan Kunci sebagai Bahan Renungan bagi Serikat Pekerja	33
5.2 Jalur untuk Tindakan dan Pembelajaran Iteratif	34
5.4 Bahan Renungan	35
Daftar Pustaka	36

Daftar Gambar

Figure 1. Gambar 1. Kerangka kerja berlapis untuk memetakan struktur ekonomi kota batu bara	5
---	---

Daftar Tabel

Tabel 1. Perbedaan Utama Penerima Upah (UP) vs. Penerima Non-Upah (BPU)	26
---	----

Daftar box

Box 1. Kerangka lapisan kerja untuk memetakan struktur ekonomi di kota batu bara	4
Box 2. Keputusan Strategis untuk Pelibatan Serikat Pekerja	33

Daftar Singkatan

AKAD	Antar Kota Antar Daerah
AKL	Local Inter-Regional Workers
BPS	Biro Pusat Statistik
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CV	Commanditaire Vennootschap (bentuk perusahaan)
GRDP	<i>Gross Regional Domestic Product</i>
KPC	Kaltim Prima Coal
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
APD	Alat Pelindung Diri
PT	Perusahaan Terbatas
UMK	Upah Minimum Kabupaten
UMSK	Upah Minimum Sektoral Kabupaten

1.0 Pengantar

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi pertambangan batu bara, yaitu di Sangatta di kabupaten Kutai Timur dan di Berau di kabupaten Berau, dimana keduanya itu berlokasi di Kalimantan Timur, dan di Bingin Teluk di kabupaten Musi Rawa Utara, Sumatera Selatan. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah pertambangan batu bara terbesar di Indonesia di mana konsesi pertambangan tersebut mencakup wilayah yang luas dan mempekerjakan ribuan pekerja. Di Sangatta, konsesi pertambangan batu bara itu dioperasikan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang mempekerjakan 3.909 orang pekerja dan mengontrak 129 perusahaan. Sehingga, jumlah total pekerja menjadi 26.606 orang. KPC mengendalikan konsesi seluas 93.000 hektar, termasuk didalamnya merupakan area pertambangan batu bara Bengalon. Di Berau konsesi seluas 100.000 hektar dikelola oleh Berau Coal dimana daerahnya mencakup area di Lati, Binungan, dan Sambrata sejak 1983. Sementara, di Bingin Teluk, PT Gorby Putra Utama, yang merupakan anak perusahaan Atlas Resources, mengelola konsesi seluas 10.980 hektar. Ini memperkuat posisi perusahaan pemain kunci di sektor baru bara di Indonesia.

Di daerah-daerah penghasil batu bara, pertambangan lebih dari hanya industri. Batu bara merupakan tulang belakang ekonomi lokal, membentuk struktur ketenagakerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Penghidupan ribuan pekerja, baik itu formal maupun non formal, secara langsung terkait dengan operasional tambang batu bara. Perusahaan pertambangan besar mempekerjakan tenaga-tenaga ahli untuk ekstraksi, pemrosesan dan logistik. Namun, selain dari pekerja-pekerja ini, perusahaan juga mengontrak beberapa pekerja subkontraktor dan informal, tentu saja berdasarkan industrinya. Pekerjaan pertambangan ini juga dibantu oleh supir truk yang membawa batu bara ke berbagai daerah, bengkel-bengkel kecil yang memperbaiki peralatan pertambangan, penjaja makanan untuk para pekerja, dan montir lokal yang menjaga agar sistem transportasi terus berjalan. Kehadiran pertambangan batu bara menentukan pola ketenagakerjaan, arus pendapatan, dan keseluruhan ritme ekonomi masyarakat sekitar.

Ketergantungan ekonomi tidak hanya mempengaruhi pekerjaan individual, namun juga menciptakan efek riak bagi ekonomi lokal dan nasional. Pertambangan batu bara menciptakan sejumlah industri pendukung dan menghasilkan hubungan ke belakang seperti permintaan atas pemasok peralatan, distributor bahan bakar, dan perusahaan konstruksi yang menyediakan jasa

esensial bagi firma firma pertambangan. Pada saat yang bersamaan, batu bara yang diekstraksi dari pertambangan ini disalurkan ke pembangkit tenaga listrik, produsen baja, dan pasar ekspor. Ini menciptakan hubungan ke depan yang memperluas dampak industri ini diluar pertambangan itu sendiri. Sementara itu, upah yang diterima penambang dan pekerja subkontraktor dihabiskan di usaha-usaha lokal seperti di pasar, restoran, sekolah, dan pengembang perumahan yang mana ini memastikan bahwa peredaran uang tetap berada di komunitas sekitar pertambangan. Dengan ini, pertambangan batu bara tidak hanya menjadi sumber utama mata pencaharian tetapi juga menjadi suatu kekuatan dominan yang membentuk kelangsungan hidup ekonomi daerah.

1.2 Pertanyaan dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorisasikan ekonomi informal di sekitar daerah pertambangan di tiga lokasi. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menilai kondisi pekerja informal di pertambangan termasuk keselamatan, upah, dan status kepegawaian mereka serta menganalisa tantangan kunci yang mereka hadapi. Untuk mencapai tujuan ini penelitian akan menjelajahi tipe dan pola aktivitas ekonomi informal di daerah sekitar pertambangan, hubungan antara pekerja informal dengan pekerja kunci di sektor pertambangan batu bara, serta mekanisme rekrutmen dan jejaring kerja mereka. Sebagai tambahan, penelitian ini juga akan menyelidiki sistem upah, mekanisme pembayaran upah, kondisi kesehatan lingkungan kerja, dan status kepegawaian pekerja informal.

Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah “Bagaimana operasi ekonomi informal di sekitar daerah pertambangan di tiga lokasi di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, serta peran apa yang dimainkan oleh ekonomi informal di rantai produksi batu bara yang lebih luas?” Untuk menjelajahi ini, peneliti akan merinci pertanyaan utama menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan operasional yang berfokus pada isu kunci seperti hubungan industri, kondisi kerja, dan pola produksi serta konsumsi.

1.3 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diintegrasikan dengan analisa kuantitatif apabila diperlukan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan 41 responden dari tiga lokasi tambang, yaitu Berau, Sangatta, dan Rawas Iilir. Data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah lokal maupun pusat, dan berbagai laporan dari biro pusat statistik dan perusahaan-perusahaan tambang.

Data diproses dan dianalisa menggunakan kerangka kerja struktur berlapis yang mengkategorisasikan rantai pasok pertambangan batu bara menjadi 4 level. Lapisan ini bukan hanya klasifikasi ekonomi yang abstrak, namun mereka merefleksikan pengalaman nyata dari pekerja dan usaha yang dilaksanakan dalam berbagai skala di industri tersebut. Secara metodologis, pendekatan ini mengacu pada teori tingkat abstraksi milik Bertell Ollman (2003),

yang memandang abstraksi sebagai alat penting untuk mengisolasi hubungan tertentu dalam sistem yang kompleks. Di dalam studi ini, empat lapis akan dibangun sebagai level ekonomis dan organisasi pekerja yang saling terhubung sehingga memungkinkan analisa untuk bergerak di antara pengalaman konkret pekerja, misalnya dari segi ketidakpastian upah, kontrak informal, dan kesenjangan dalam jaminan perlindungan sosial, dan mekanisme yang lebih abstrak yang dialami oleh struktur tersebut, seperti rezim subkontrak, pengecualian institusional, dan pola ketergantungan yang lebih luas. Secara krusial, ini bukanlah analisa linear namun gerakan dialektikal, dimana ini bermula dari abstraksi terisolir dari suatu pengalaman ke keseluruhan konkret dari suatu sistem dimana pengalaman-pengalaman tersebut tertanam. Untuk melengkapi ini, kerangka kerja yang dicetuskan oleh Gary Gereffi (2010) tentang pendekatan “Global Value Chain” (Rantai Nilai Global) yang menggarisbawahi bagaimana aktifitas ekonomi hubungan kerja dikelola secara hirarkis di seluruh jaringan perusahaan utama, perantara, dan aktor pinggiran. Secara bersamaan, perangkat konseptual ini memungkinkan kerangka kerja berlapis ini untuk memetakan bagaimana kekuatan, nilai, dan kerentanan terdistribusi di antara ekonomi batu bara, dan mengungkapkan bagaimana segmen-segmen yang berbeda dari suatu angkatan tenaga kerja diposisikan dalam dinamika transisi dan ketidakpastian yang sedang berlangsung.

Berlandaskan dasar konseptual ini, kerangka kerja berlapis berikut berguna untuk secara konkret memetakan struktur ekonomi kota tambang batu bara dan menggarisbawahi bagaimana tipe pekerjaan dan perusahaan yang berbeda diposisikan, dilindungi, dan dikecualikan dari rantai pasok secara umum.

Box 1. Kerangka lapisan kerja untuk memetakan struktur ekonomi di kota batu bara

Lapis Pertama: Perusahaan Pertambangan Inti

Di tempat teratas hirarki ini merupakan perusahaan pertambangan berskala besar, baik itu yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Perusahaan-perusahaan ini mengawasi ekstraksi batu bara dan berinvestasi secara signifikan di dalam produksinya. Perusahaan-perusahaan ini juga lah yang memegang kontrak langsung dengan pembeli besar seperti pembangkit tenaga listrik, produsen baja, dan konsumsi global.

Lapis Kedua: Pemasok dan Kontraktor Langsung

Termasuk dalam lapis ini adalah firma-firma berskala menengah yang menyediakan layanan esensial misalnya permesinan, transportasi dan logistik pada perusahaan tambang inti. Walaupun mereka memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan mereka yang di lapis pertama, operasional mereka kadang dibentuk oleh kondisi kontrak yang sering berfluktuasi sebagai pengaruh dari dinamika umum pasar batu bara.

Lapis Ketiga: Pekerja Informal dan Pemasok Tidak Langsung

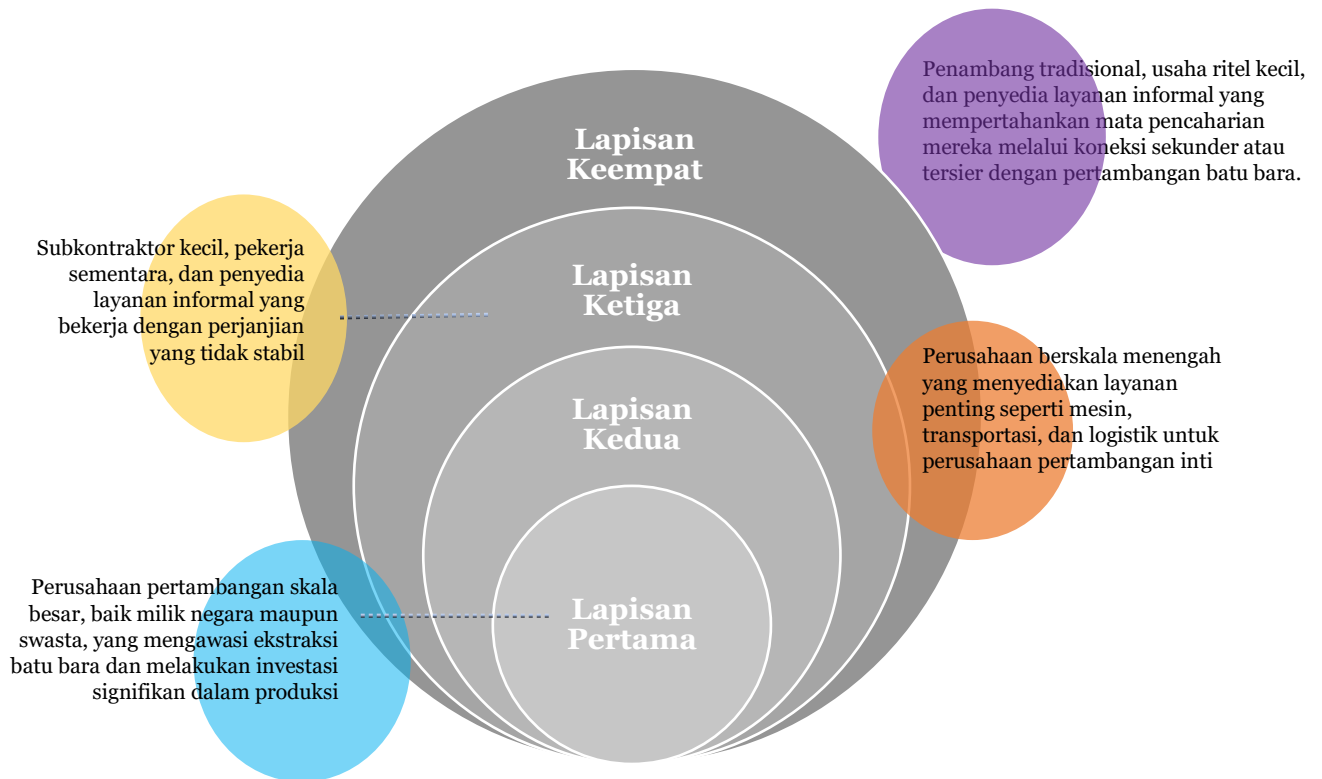
Pada lapis ini, ketidakpastian meningkat. Yang termasuk dalam lapis ini adalah mereka para pekerja subkontraktor kecil, tenaga kerja sementara, dan penyedia layanan informal yang masing-masing bekerja di bawah perjanjian yang tidak stabil. Pekerja di lapis ini menghadapi masalah seperti perlindungan perundang-undangan yang terbatas, upah kecil, dan keterpaparan tinggi terhadap volatilitas pasar. Banyak dari perusahaan atau bidang usaha di lapis ini beroperasi secara tidak resmi dan pendapatan serta kondisi kerja mereka didikte oleh kesepakatan informal dengan firma yang lebih besar.

Lapis Keempat: Ekonomi Periferal dan Informal

Berdasarkan marjin industri, penambang tradisional, bisnis eceran kecil, dan penyedia layanan informal menopang penghidupan mereka melalui koneksi sekunder atau tersier dengan penambangan batu bara. Beberapa dari mereka memunguti batu bara yang tersisa di lokasi tambang yang ditinggalkan, beberapa menyediakan makanan dan tempat tinggal untuk penambang, dan beberapa menyediakan jas pengangkutan berskala kecil. Sebagian besar aktifitas ekonomi mereka diluar pengawasan peraturan perundangan dan sangat tergantung pada permintaan industri yang terus bergeser.

Melampaui Tambang: Situasi Ekonomi Berlapis Tambang Batu bara dan Ketergantungan Komunitas Sekitarnya: Sebuah Laporan

Dalam kerangka kerja ini, peneliti menganalisa aspek-aspek kunci seperti kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengupahan, dan istilah-istilah ketenagakerjaan di dalam ekonomi informal. Dengan memetakan pekerja informal di setiap lapis, penelitian ini berupaya untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh para pekerja informal, terutama karena adanya kemungkinan penutupan kegiatan pertambangan kedepannya.



Gambar 1. Kerangka kerja berlapis untuk memetakan struktur ekonomi kota batu bara

Source: Author's diagram.

Sejak tahun 1990, Sangatta telah menarik migran dari seluruh pelosok Indonesia, terutama dari Sulawesi dan Jawa. Migran tersebut tertarik dengan kesempatan kerja di sektor pertambangan atau dengan kesempatan membangun usaha yang bisa mendukung kota yang sedang berkembang. Para pendatang ini membentuk budaya dan demografi kota Sangatta. Sangatta terletak berhadapan langsung dengan selat Sulawesi. Ini menyebabkan banyak migran berasal dari sana. Penduduk Sangatta sekarang merupakan penduduk generasi kedua dari para migran tersebut, dan mereka mencari mata pencaharian di kota itu.

Sangatta merupakan pusat administratif dari kabupaten Kutai Timur. Selain mejadi kota utama dari kabupaten tersebut, sangatta juga menjadi pusat kegiatan ekonomi. Kutai Timur awalnya terpisah dari kabupaten Kutai di 1999. Namun kini, area Kutai Timur mencapai area seluas 31.293,29 kilometer persegi yang terdiri dari 18 kecamatan dan rumah bagi 429.640 perumahan (2024).

Di tahun 2024, Kutai Timur mencatat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sejumlah 159,49 triliun rupiah, dan ini menjadikan Kutai Timur kabupaten terkaya kedua di Kalimantan Timur dan salah satu terkaya di Indonesia. Sektor pertambangan dan penggalian mendominasi perekonomian lokal, berkontribusi sekitar 17,1 triliun rupiah atau 79,67%⁵ dari total PDRB. Angka yang luar biasa ini memastikan peran utama sektor ini sebagai pendorong ekonomi utama di daerah itu.

Kontribusi yang substansial dari sektor pertambangan ke PDRB secara jelas menekankan sektor ini sebagai pendorong utama ekonomi Kutai Timur. Ketergantungan ini lebih jauh dicerminkan di pendapatan daerah yang tinggi yang dihasilkan dari pertambangan batu bara. Di tahun 2024, Kaltim Prima Coal sendiri berkontribusi sekitar 547 miliar rupiah pada pendapatan kabupaten Kutai Timur.⁶ Sebagian besar batu bara yang diproduksi di Kutai Timur di ekspor ke luar negeri, dan ini menjadikan ekonomi daerah itu sangat rawan terfluktuasi oleh harga batu bara global dan volatilitas nilai tukar.

Selain industri batu baranya, Kutai Timur juga produsen besar minyak kelapa sawit. Di tahun 2024, total area perkebunan kelapa sawit telah mencapai 582.917 hektar dan ini merupakan salah satu area perkebunan terluas di Kalimantan Timur. Di tahun yang sama produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai 48,2 juta ton. Meskipun angkanya luar biasa, kontribusi dari minyak kelapa sawit lumayan rendah. Di tahun 2024, kontribusi minyak kelapa sawit hanya 8% dari total PDRB. Ini jauh dari angka kontribusi batu bara. Sehingga, dampaknya terhadap

5 <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=wCgpCrfmqZbK8e1coomZfkNjeU9NZDJQbIzLRkhUdXJLMVh1bWFUbs9sWUd0MnRIYU5heHUrc2gw bUpsQXBOZXNTUzFSQmo0VU8vblhVRFd1cWd5K3Vya2dxcjQ0ek56UmNLcW0rdVVhdEp5MU5WdGx2 YmVCdHNodjdPV1MyWTh1dWdzekNsVTJ2b21UQnJSUmZmamhPekFZZWU5T1JibGV1Nlh1MVBrQXYv ZGs5OEloTGpmMVN3TWtldFg2YnpHajBSZVJDTUpDRmdJdmRHwMjZmNjU3RGY0FwWStsZVlzdjR PelZrYXQ5aHpCejRmciswQlliQ04zMkYrQ29xRm00Yk93VUZqUzJOaE1FZEJOWWQ2MjJQMGIoendwVn hpSEI5bDd0Uzg2c2VnajNpRGtsTG15MUpndDd1Z2ZyMDBuWVdkOTNCRWp0S0h5RmdL>

6 <https://insightkaltim.com/2024/07/23/potensi-pendapatan-kutim-dibahas-fokus-pada-tambang-dan-sawit/>

pendapat lokal kabupaten juga sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 36 miliar rupiah. Ini sangat jauh dari kontribusi sektor pertambangan dan penggalian.

Sangatta berada di bawah yurisdiksi administratif Kabupaten Kutai Timur, di mana upah minimum tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 3.536.506. Namun, upah rata-rata bagi mereka yang baru bergabung di sektor tambang batu bara berkisar di angka 6 sampai 7 juta rupiah. Upah ini jauh di atas upah minimum regional. Karena kesenjangan upah ini, banyak migran tertarik untuk bekerja di sektor ini, dan ini menjadikan Sangatta sebagai pusat migrasi tenaga kerja.

Inti perekonomian Sangatta adalah tambang terbuka PT Kaltim Prima Coal yang luas. Tambang ini adalah salah satu yang terbesar di dunia, mencakup area seluas 90.000 hektar dan mencakup tiga area sekaligus yaitu Sangatta, Bengalon, dan Rantai Pulung. Tambang ini berjarak sekitar satu jam dari daerah perkotaan, dan ada bus yang mengangkut pekerja dari dan menuju tambang setiap hari. Saat ini, belum ada transportasi umum yang bisa mengangkut tenaga kerja pertambangan. Para pekerja saat ini tergantung dari transportasi yang disediakan pemberi kerja.

Secara historis, KPC menyediakan perumahan bagi karyawannya di daerah yang dikenal sebagai Swarga Bara⁷, yang kemudian menjadi desa administratif. Ketika pekerja pensiun dan kembali ke kampung halamannya, rumah mereka disewakan kepada karyawan baru. Seiring berjalannya waktu, permintaan untuk perumahan melebihi apa yang tersedia di Swarga Bara. Ini membangkitkan pasar rumah lokal. Banyak penambang tinggal di rumah sewaan yang tersebar di lingkungan perkotaan yang semakin berkembang.

Kaltim Prima Coal (KPC) memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada pemerintahan lokal dan nasional melalui pajak dan royalti⁸. Selain itu, KPC juga berperan penting dalam mengembangkan infrastruktur lokal di Sangatta. Antara tahun 2018 sampai 2022, KPC berkontribusi dalam pembuatan jalan sepanjang 40.2 kilometer di daerah tersebut.

KPC mengoperasikan kegiatan pertambangannya melalui rekanan dengan perusahaan-perusahaan kontraktor. Para kontraktor inilah yang bertanggung jawab dalam berbagai aspek pertambangan, misalnya dalam hal survey tanah, pembebasan lahan, dan ekstraksi batu bara. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan-layanan yang relevan seperti transportasi batu bara, penyewaan alat berat, dan kebutuhan operasional lainnya. Para kontraktor ini sangat tergantung pada penyedia layanan yang sangat beragam, khususnya dalam layanan komunikasi, transportasi, kelistrikan, persediaan barang-barang kimia, layanan *blasting*, konstruksi, peralatan, katering, keamanan, dan pengelolaan air. Beberapa juga menggunakan layanan pihak

7 Percakapan informal dengan Toni, mantan pekerja KPC. Ia pensiun beberapa tahun yang lalu.

8 Dari tahun 2017 sampai dengan 2022, KPC telah membayar royalti dan pajak kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp 112,35 triliun (<https://radarkutim.com/kinerja-kpc-diapresiasi-isran-dukung-royalti-dan-pajak-tembus-rp-112-t/>)

ketiga untuk mendapatkan tenaga kerja dimana sebagian diantaranya berasal dari sektor diluar pertambangan.

Laporan ini mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan seperti PT Pamapersada Nusantara dan PT Mandiri Herindo Adiperkasa sebagai bisnis lapis kedua mereka. Perusahaan-perusahaan ini memiliki keterikatan langsung dengan bisnis lapis pertama seperti KPC. Sementara, perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan pendukung misalnya untuk transportasi, listrik, katering, dan keamanan di klasifikasikan ke dalam lapis ketiga. Bidang usaha lapis ketiga ini menyediakan barang, jasa, dan tenaga kerja untuk kontraktor di lapis kedua.

Baik itu perusahaan lapis kedua atau lapis ketiga memiliki staf tersendiri. Menurut data internal KPC, lebih dari 21.000 tenaga kerja dipekerjakan oleh kontraktor yang bekerja untuk KPC. Pekerja dan keluarga mereka tinggal di Sangatta, dan ini menciptakan permintaan untuk berbagai jenis barang dan jasa. Bidang usaha yang menyediakan kebutuhan ini diklasifikasikan sebagai kelompok usaha lapis ke empat.

Bidang usaha lapis ke empat tidak memiliki keterikatan ekonomi langsung dengan KPC atau kontraktor mereka. Mereka melayani kebutuhan para pekerja tambang dan keluarga mereka. Yang termasuk dalam grup ini adalah usaha kecil dan informal, seperti misalnya pemilik bisnis kos-kosan, pemilik rumah sewaan, penjaja makanan pinggir jalan Yos Sudarso, penjual es teh di daerah pemukiman, kurir bersepeda motor, penjual sayuran, pemilik toko kelontong, dan penyedia minuman isi ulang.

Penting untuk dicatat bahwa bidang usaha lapis keempat ini menopang jaringan ekonomi lokalnya sendiri. Kebanyakan dari pelaku usaha di lapis ini, seperti nelayan dan petani sayur, mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan sektor pertambangan, namun barang mereka mencapai para penambang dan keluarga mereka melalui tukang jualan, kios, atau restoran. Oleh karena itu, mereka menjadi bagian dari rantai ekonomi pertambangan, walaupun tidak secara langsung.

2.2 Tanjung Redeb: Pusat Ekonomi Batu bara Berau dan Lanskap Sosialnya

Tanjung Redeb merupakan pusat ekonomi dan administratif kabupaten Berau di Kalimantan Utara, Indonesia. Meskipun daerah ini tidak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 25 kilometer persegi, namun kota ini memegang peran yang sangat besar. Daerah ini merupakan pusat pelayanan dan perdagangan utama dimana terdapat kantor-kantor kunci pemerintahan, bank komersil, markas perusahaan. Infrastruktur seperti bandar udara dan pelabuhan juga ada di kota ini, dan di beberapa tahun belakangan ini, sudah tersedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Semua ini merupakan indikator sebuah kota yang sedang berkembang.

Kota kecil ini juga merupakan rumah bagi sebagian besar tenaga kerja di sektor pertambangan. Banyak pekerja disini tinggal di rumah sewaan atau kamar kos yang tersebar di beberapa tempat di kota ini. Walau beberapa situs pertambangan terletak di daerah pedesaan, sebagian besar berlokasi di kecamatan-kecamatan seperti Sambaliung, Sungai Lati, Sambarata dan Gurimang dimana mereka bisa dicapai menggunakan jalan dengan waktu tempuh sekitar 40 menit sampai dengan satu jam lebih. Kehidupan sehari-hari di Tanjung Redeb mencerminkan dinamika di mana di pagi hari dan di sore hari diwarnai oleh beberapa armada bus dan mobil SUV yang membawa pekerja dari dan ke situs pertambangan. Selain itu, jenis kendaraan yang terkait dengan pertambangan lainnya, misalnya mobil SUV, yang dilengkapi dengan antena dan peralatan keamanan lain, kadang juga terlihat mengangkut pekerja dari dan ke lokasi pertambangan yang terletak di luar Tanjung Redeb.

Bagi masyarakat umum, pilihan transportasi yang tersedia adalah minibus atau bus-bus besar. Namun, semenjak adanya layanan transportasi berbasis aplikasi di kabupaten Berau sejak 2019, berbagai macam transportasi darat tradisional mengalami tekanan. Sebagaimana di daerah lain, transportasi umum kurang bisa diandalkan. Ini menyebabkan kebanyakan orang lebih suka menggunakan kendaraan sendiri untuk transportasi mereka, biasanya motor atau mobil.

Tanjung Redeb dikelilingi oleh sungai Segah dan Kelai. Kedua sungai ini bersatu di Sambaliung dan pada akhirnya bermuara di Sungai Lati. Perairan ini merupakan rute logistik yang sangat penting untuk transportasi batu bara. Selain itu, perairan ini juga merupakan jalur barang masuk dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya dari Jawa. Pelabuhan kota memegang peranan penting dalam infrastruktur perdagangan di wilayah tersebut.

Meski areanya kecil, Tanjung Redeb dipopulasi oleh banyak orang. Di tahun 2023, ada hampir 75.000⁹ orang tinggal disana, ini sekitar seperempat dari total populasi di Berau. Mayoritas penduduk adalah migran terutama dari Jawa dan Sulawesi. Kebanyakan pendatang tersebut bermigrasi ke daerah tersebut karena maraknya pertambangan batu bara yang dimulai di tahun 1980an. Tren ini berlanjut sampai sekarang dan migrasi tersebut berdampak pada pertumbuhan populasi. Hanya di tahun 2023, populasi di Berau bertambah sebanyak 4.000 orang.

Di tahun 2023, sebanyak 10.144 orang bermigrasi ke Berau¹⁰. Para migran tersebut terdiri dari migran antar kecamatan dan migran antar provinsi. Walaupun belum jelas apakah migran

9 Kabupaten Berau dalam Angka 2024 tersedia di <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=3ewRXsHGceCwsJKH7qz9WVFBMXBPNDJra3dVSG9jVFpZWU1JTTQ5bHZKM01Db0VLdE04ME1CZFBzM2JkbnkVPN0trMmZIOGhYQW9vRnRMZWFwbGdvYTBoTnpiQ3JqTW4rVW52by94QXNiYUlwclVcnVxOGd3SnhrUU12K0xIS1JaRzhqN2ICSzhyR3M5bXhJUTljZVZrdjFITG5rcC9HdUwzZys1VVRFU0M4MmxEUGJObnkySGl2RUNBbWhoMElrvVC96ZkYJTURJWIA2dnp6Wi9SOUVwUHRwSjhjUFIDZmIPZGVuRzVmmdmJwcW1CNWZfb0hjckNsY3puTmtYS014UkxDTHZDcUNNQWp1bG1HRks>

10 Profil Perkembangan Kependudukan 2023 Kabupaten Berau, available at: <https://disdukcapil.beraukab.go.id/files/DATA%20PROFIL-143-file.pdf>

tersebut sudah menetap permanen di Berau, Kantor Pencatatan Sipil dan Populasi Kota Berau melaporkan bahwa 90% migrasi disebabkan pencarian tenaga kerja¹¹.

Tingkat migrasi yang tinggi ini didorong oleh pencarian pekerjaan telah meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja lokal. Di tahun 2024, kabupaten Berau memiliki 46.009 pekerja dimana lebih dari separuhnya bekerja di sektor pertambangan batu bara berskala kecil dan besar. Tenaga kerja ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (1) tenaga kerja lokal sejumlah 27.265 orang dimana mereka merupakan individu dengan KTP Berau, lalu (2) tenaga kerja antar daerah (AKAD) sejumlah 12.609 orang, yang terdiri dari pekerja migran yang direkrut dari provinsi lain dan tidak memiliki KTP Berau, dan (3) tenaga kerja lokal antar daerah (AKL) sejumlah 6.075 orang yang merupakan pekerja dari provinsi yang sama namun beda kecamatan¹².

Kehadiran pekerja kategori AKAD dan AKL memunculkan kekhawatiran dan kebencian pada masyarakat lokal. Banyak perusahaan tambang, terutama perusahaan tambang besar, lebih suka memilih angkatan kerja lokal dengan mekanisme AKAD dan AKL. Sebagai akibatnya, warga lokal dan masyarakat adat dan mereka yang memegang KTP Berau menghadapi tantangan dalam mengakses ketenagakerjaan, terutama untuk sektor tambang dengan bayaran tinggi. Kecemburuan sosial dan disparitas ekonomi antara pekerja non lokal (AKAD) dan AKL dan pekerja lokal memicu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Lokal, yang ditujukan untuk mengamankan akses warga lokal terhadap kesempatan ketenagakerjaan.

Upah minimum Berau yang lumayan tinggi mencerminkan ekonominya yang berbasis sumber daya. Di tahun 2024, Upah Minimum Kabupaten-nya (UMK) ditentukan di angka 3.832.297 rupiah dimana ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur. Upah minimum sektoral di sektor kelapa sawit dan tambang batu bara relatif lebih tinggi. Selain itu, di dalam praktiknya, pekerja tambang bisa mendapatkan upah lebih tinggi karena shift yang panjang dan kerja lembur.

Sektor tambang memainkan peran penting dalam berkontribusi ke pendapatan daerah kabupaten Berau. Di tahun 2023, sektor mineral dan tambang berkontribusi sekitar 2 triliun

11 <https://berapost.jawapos.com/utama/2445477280/penduduk-berau-melonjak-kelahiran-dan-perpindahan-penyebab-utama#:~:text=TANJUNG%20REDEB%20%2D%20Jumlah%20penduduk%20di%20Berau,mencapai%207.945%20jiwa%20dibandingkan%20akhir%20tahun%20lalu>.

12 Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah, atau AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), mengacu pada proses formal penempatan tenaga kerja lintas provinsi. Perusahaan tambang sering menggunakan mekanisme ini untuk merekrut tenaga kerja dari luar provinsi. Demikian pula, penempatan tenaga kerja intraregional—dalam satu provinsi—mengacu pada penempatan tenaga kerja lintas kabupaten atau kota. Tenaga kerja yang direkrut melalui kedua proses ini dapat berdomisili di satu kabupaten, seperti Berau, tanpa perlu mengubah domisili resmi atau memperbarui kartu identitas (KTP) agar sesuai dengan lokasi mereka saat ini. Nuansa administratif inilah yang berkontribusi pada tingginya jumlah tenaga kerja di Berau yang tercatat dalam kedua kategori ini.

rupiah atau sekitar 52% pendapatan total daerah Berau¹³. Sementara itu, di tahun 2024, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Berau mencapai 50.8 triliun rupiah dengan sektor pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar yakni sebesar 26,96 triliun rupiah atau 53,08% dari total PDRB Berau¹⁴. 46.92% sisanya diperoleh dari kombinasi 16 sektor termasuk agrikultur, kehutanan dan perikanan, perdagangan grosir dan eceran, perbaikan kendaraan, konstruksi, transportasi, manufaktur dan jasa.

Menurut data BPS¹⁵, sektor pertambangan dan penggalian sudah lebih dari satu dekade menjadi pendorong roda ekonomi di kabupaten Berau. Namun, kontribusinya mulai berkurang sejak tahun 2020. Ini dikarenakan produksi batu bara yang berkurang sebagai akibat kebijakan yang diterapkan selama masa pandemi COVID-19. Angkanya sempat naik di tahun 2022 sebelum kembali menurun di tahun 2023. Fluktuasi ini memiliki dampak langsung terhadap kinerja ekonomi di kabupaten Berau dimana PRDBnya naik dan turun sesuai dengan luaran sektor pertambangan.

Hal ini mencerminkan betapa tergantungnya ekonomi Berau pada sektor batu bara. Kontribusi yang menurun di sektor tersebut, baik karena produksi batu bara yang menurun, volatilitas harga di pasar internasional, atau permintaan yang melemah dari negara tujuan, memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi daerah secara keseluruhan.

Pemain utama di sektor ini di Berau adalah PT Berau Coal yang sudah beroperasi sejak 1983. Berkantor pusat di Tanjung Redeb, konsesi perusahaan mencakup lebih dari 100.000 hektar di beberapa kecamatan. Perusahaan ini secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan sekitar 23.000 pekerja, termasuk pekerja di perusahaan subkontraktor mereka seperti PT BUMA dan PT Pamapersada Nusantara.

Jika 80% dari 23.000 orang pekerja ini tinggal di Tanjung Redeb, maka tepatnya 18.400 orang bepergian dari dan menuju tempat kerja setiap hari. Kalau kita masukkan pasangan dan anak-anak mereka, maka sekitar 70% populasi kota tergantung secara langsung dengan industri batu bara untuk kehidupan mereka. Tingkat ketergantungan ekonomi seperti ini menggarisbawahi kerentanan kota terhadap pergeseran di sektor batu bara, baik karena fluktuasi pasar, perubahan peraturan, atau pertimbangan lingkungan.

Ekonomi pertambangan didukung oleh jejaring perusahaan berlapis, seperti:

13 <https://benuanta.co.id/index.php/2024/08/06/bupati-sebut-sektor-tambang-batu-bara-sumbang-52-persen-pendapatan-daerah/150206/15/53/34/>, <https://rri.co.id/daerah/887401/berau-masih-melihat-pad-dari-sektor-pertambangan#:~:text=Sri%20menyebut%20sektor%20pertambangan%20dan%20perkebunan%20merupakan,berkontribusi%2052%20persen%20dari%20pendapatan%20daerah%2C%E2%80%9D%20ucapnya.>

14 BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau Menurut Lapangan Usaha 2020 – 2024, available at <https://beraukab.bps.go.id/id/publication/2021/04/05/4e776fe0878e530e12dc2e1a/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-berau-menurut-lapangan-usaha-2016-2020.html>

15 BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau Menurut Lapangan Usaha 2020 – 2024, available at <https://beraukab.bps.go.id/id/publication/2021/04/05/4e776fe0878e530e12dc2e1a/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-berau-menurut-lapangan-usaha-2016-2020.html>

- **Lapis pertama** adalah PT Berau Coal itu sendiri
- **Lapis kedua** adalah perusahaan pertambangan seperti PT BUMA yang beroperasi di Lati dan Binungan yang mempekerjakan sekitar 3.000 pekerja. Kontrak dengan PT BUMA akan berakhir di tahun 2025, dan pemberhentian pekerjaannya akan dilaksanakan di mulai di awal bulan Desember 2024.
- **Lapis ketiga** adalah perusahaan-perusahaan subkontraktor dan pemasok yang mendukung perusahaan lapis kedua. Perusahaan ini sangat beragam, dimulai dari perusahaan yang memiliki legalitas sampai perusahaan koperasi dan usaha-usaha informal kecil. Mereka adalah usaha yang menyediakan pelayanan seperti transportasi, penyewaan alat, katering, dan keamanan. Tidak ada data komprehensif yang menyebutkan berapa jumlah pekerja dan usaha di lapis ini.
- **Lapis keempat** meliputi usaha-usaha kecil dan mikro yang secara tidak formal mendukung ekonomi batu bara, misalnya penjaja makanan, warung kopi, toko kelontong, penjual baju, toko roti, kurir, dan lainnya. Usaha ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari di Tanjung Redeb, meski kadang usaha-usaha tersebut tidak memiliki proteksi hukum atau kesepakatan ketenagakerjaan formal.

2.3 Rawas Ilir: Kehidupan, Pekerjaan, dan Transisi di Kabupaten Sungai di Sumatera Selatan

Rawas Ilir merupakan kecamatan yang berlokasi di pinggiran Sungai Rawas dan bagian dari kawasan kabupaten Musi Rawa Utara di Sumatera Selatan yang baru saja terbentuk. Kawasan ini merupakan pecahan dari kawasan yang lebih besar yaitu Musi Rawas. Kawasan ini memiliki luas sekitar 6.000 kilometer persegi dan terdiri dari 7 kecamatan. Rawas Ilir sendiri memiliki luas 1.000 kilometer persegi dan rumah bagi kurang lebih 30.000 orang penduduk yang tersebar di 12 desa dan satu unit administratif pusat.

Desa utama di kawasan ini namanya Bingin Teluk yang berfungsi sebagai ibu kota kabupaten. Namun, kegiatan sehari-hari terjadi di Bingin Teluk dan Beringin Makmur II. Kedua desa ini merupakan desa utama di kawasan ini dimana didalamnya terletak kantor pemerintahan lokal, sekolah, pusat kesehatan, pasar, dan fasilitas kunci lainnya. Satu-satunya sekolah menengah di seluruh kecamatan, SMA Negeri Bingin Teluk, berlokasi di Beringin Makmur II. Kedua desa ini memberikan akses penting bagi orang-orang di kawasan Rawas Ilir, seperti perbankan dan pelayanan kesehatan.

Pembentukan Musi Rawas Utara sebagai kabupaten memberikan manfaat yang tidak diperkirakan, yaitu jarak yang dekat. Yang biasanya perjalanan harus menempuh 130 km ke ibukota kabupaten yang lama, yaitu ke Muara Beliti, kini hanya berjarak 50 km saja ke ibukota kabupaten yang baru, yaitu Muara rupit. Perubahan yang sederhana ini memberikan dampak yang sangat besar, yaitu membuat akses ke pelayanan administratif, pelayanan kesehatan, dan ke pusat ekonomi menjadi lebih mudah dimana dulunya orang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dan memperbaharui dokumen.

Seperti banyak masyarakat tepi sungai, desa-desa di Rawas Ilir tumbuh di sepanjang tepi sungai. Sudah lama sungai menjadi bagian penting dari kehidupan karena sungai memberikan air untuk keperluan sehari-hari, tempat mencuci dan mandi, dan sebagai sarana transportasi. Namun, waktu telah berubah. Dengan perluasan bertahap dari jalan darat dan infrastruktur lainnya, sungai tersebut kehilangan perannya sebagai jalan utama masyarakat.

Di beberapa desa, sungai masih berperan sebagai pemisah. Tanjung Raja, misalnya, terbagi dua oleh sungai. Hal yang sama juga ditemukan di Beringin Makmur. Walaupun kini beberapa desa sudah terhubung oleh jembatan, kapal feri masih menjadi moda penyebrangan yang paling terpercaya, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Beberapa dekade ke belakang, ekonomi Rawa Ilir sangat ditentukan oleh karet dan kelapa sawit. Banyak keluarga mengandalkan perkebunan kecil sebagai sumber mata pencaharian mereka, yaitu dengan memanen pohon karet dan memelihara perkebunan kelapa sawit. Di tahun 2023, kecamatan ini memproduksi 27.000 ton karet dan 14.000 ton kelapa sawit. Di luar kawasan Musi Rawas Utara, angkanya lebih besar lagi, menjadikannya salah satu produsen karet terbesar di Sumatera Selatan dan menduduki peringkat ke empat dalam hal produksi kelapa sawit.

Namun, transisi sedang berlangsung. Dengan menurunnya harga karet dan semakin menguntungkannya kelapa sawit, makin banyak penduduk desa yang mulai meninggalkan penanaman pohon karet. Kawasan karet semakin berkurang sementara perkebunan kelapa sawit, baik itu yang besar ataupun kecil, semakin meluas. Banyak rumah tangga yang kini bergantung pada kombinasi pekerjaan di perusahaan kelapa sawit dan pendapatan mereka dari perkebunan sawit kecil dekat rumah mereka.

Desa dikelilingi oleh hutan lebat dan perkebunan kelapa sawit, dimana sebagian dimiliki oleh penduduk, dan sebagian lagi oleh perusahaan besar. Perusahaan yang terbesar adalah PT London Sumatra (Lonsum). Perusahaan ini memulai usahanya sejak tahun 1980an dengan karet, namun beralih ke kelapa sawit di tahun 1990an. Lonsum kini menoperasikan perkebunan kelapa sawit besar dan pabrik pengolahan antara Bingin Teluk dan Tanjung Raja. Kehadiran Lonsum menghadirkan infrastruktur namun juga memberikan tekanan di lahan hutan komunal yang dulunya berfungsi sebagai tempat bercocok tanam, menangkap ikan, dan meramu.

Di tahun 2010an, sebuah kekuatan ekonomi baru muncul, yaitu batu bara. Pijinan pertama untuk tambang batu bara dikeluarkan di tahun 2009, dan pertambangan dimulai di tahun 2012. Situs batu bara terletak di area luar tiga desa yaitu Beringin Makmur II, Tanjung Raja dan Belani, yang berlokasi sekitar 9 sampai 14 kilometer dari Bingin Teluk.

Pertambangan terus berkembang, walau masih belum sebesar kelapa sawit. Untuk banyak penduduk, terutama para pemuda/i, bekerja di tambang batu bara menawarkan cara mudah untuk mendapat uang dibandingkan siklus pendapatan yang lebih lambat dari karet atau kelapa sawit. Sebagai akibatnya, banyak dari mereka meninggalkan ladang dan jaring ikan mereka untuk bekerja di tambang batu bara.

Paling tidak, ada empat perusahaan yang sekarang beroperasi di Rawas Ilir, yaitu:

- PT Gorby Putra Utama (GPU)
- PT Banyan Koalindo Lestari (BKL)
- PT Bara Sentosa Lestari (BSL)
- PT Triaryani

Perusahaan-perusahaan ini terhubung dengan konglomerasi nasional misalnya Atlas Resources, Golden Energy and Resources (bagian dari Sinar Mas Group) dan Geo Energy. Ke empat perusahaan tersebut tidak sebesar Berau Coal di Berau atau KPC di Sangatta. Namun, untuk keperluan analisis, dan berdasarkan data yang ada, laporan ini akan memasukkan salah satu dari mereka, yaitu PT Gorby Putra Utama (GPU), di lapis pertama. GPU bekerja dengan beberapa subkontraktor di berbagai daerah. Salah satunya adalah PT Ulimanitra, sebuah perusahaan yang menyediakan truk sampah dan pengemudinya sebagai bagian dari layanan mereka.

Namun, Rawas Ilir masih belum menjadi kota pertambangan sebagaimana Berau atau Sangatta. Ekonomi batu bara nya sudah terlihat namun belum mengambil alih. Karet dan kelapa sawit masih menjadi sumber mata pencaharian utama dan agrikultur masih menjadi bagian kunci dari keseharian mereka.

Tidak ada angka pasti jumlah orang yang bekerja di sektor batu bara di kawasan ini, namun seharusnya lebih sedikit dari mereka yang bekerja di lokasi pertambangan besar. Pekerja tambang biasanya menggunakan sepeda motor ke tempat kerja. Jarak yang pendek dan lalu lintas yang tidak terlalu ramai tidak mengharuskan adanya layanan transportasi yang lebih besar.

Salah satu segi ekonomi yang muncul akibat pertambangan adalah penyewaan rumah. Dikarenakan perusahaan merekrut orang dari luar daerah, permintaan untuk tempat tinggal meningkat. Asrama milik perusahaan tempatnya terbatas dan ini mengakibatkan meningkatnya bisnis penyewaan kamar atau rumah. Ini merupakan dampak tidak langsung dari pertambangan yang sekarang mulai terlihat.

3.0 Ketergantungan Ekonomi pada Pertambangan Batu bara

Bagian ini menelusuri hubungan ketenagakerjaan, kondisi kerja dan dinamika ekonomi produksi dan konsumsi di industri pertambangan. Alih-alih berfokus pada lapis pertama, yaitu perusahaan tambang berskala besar yang beroperasi di tiga lokasi penelitian, laporan ini berfokus pada lapisan-lapisan di bawahnya. Namun, studi ini tetap akan melihat kondisi ketenagakerjaan di lapis pertama untuk konteks dan perbandingan.

Di laporan ini, akan dibedakan antara usaha atau ekonomi formal dan informal, dan pekerja didalamnya. Suatu usaha bisa dianggap formal apabila memiliki ijin usaha, dikelola dengan baik, menggunakan teknologi terkini, dan merekrut pekerja melalui jalur profesional. Namun, hubungan kerja di perusahaan tersebut bisa informal atau semi informal.

Dengan cara seperti ini, laporan ini melakukan pendekatan pada konsep formal dan informal sebagai suatu spektrum daripada hanya pembagian yang kaku. Pekerja di satu ujung spektrum dimasukkan dalam pekerjaan informal sepenuhnya, karena tidak memiliki semua karakteristik utama dari hubungan kerja formal. Di ujung satunya lagi adalah pekerja formal yang memiliki kontrak kerja dan perlindungan yang formal.

Oleh karena itu, ketika kami mengacu pada pekerja informal di laporan ini, kami tidak hanya mengacu kepada mereka yang bekerja di usaha atau sektor informal, namun juga mereka yang bekerja di sektor atau usaha formal, namun memiliki kondisi ketenagakerjaan yang informal. Definisi yang luas ini mencerminkan kompleksitas dan sifat beragam dari informalitas di industri pertambangan.

3.1 Hubungan Ketenagakerjaan Formal dan Informal di Sektor Pertambangan

Hubungan ketenagakerjaan yang formal biasanya ditandai oleh suatu kontrak yang ditandatangani oleh pekerja dan pemberi kerja, dan masing masing memiliki salinan kontrak tersebut. Kontrak ini biasanya memuat rincian seperti bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan, persyaratan pemutusan hubungan pekerjaan, tingkat upah, dan manfaat yang biasanya menggarisbawahi hak dan tanggung jawab setiap pihak.

Sebagaimana disebutkan di awal, laporan ini tidak berfokus pada hubungan ketenagakerjaan di perusahaan lapis pertama, namun kita akan mengacunya sesekali untuk perbandingan. Perusahaan lapis pertama biasanya adalah perusahaan besar yang mempekerjakan orang melalui pengaturan ketenagakerjaan. Pekerja di perusahaan seperti ini biasanya merupakan karyawan tetap yang menerima berbagai manfaat termasuk program pensiun.

Namun, keadaan sudah berubah sekarang. Menurut Toni, pensiunan dari PT KPC, Di lima belas tahun ke belakang ada pergeseran yang sangat terasa. Perusahaan tempat dia bekerja semakin bergantung pada pekerja subkontraktor, tidak hanya untuk peran-peran operasional di lokasi, namun juga di posisi manajemen level bawah¹⁶. Sebagai akibatnya, terjadi penurunan dalam jumlah karyawan tetap. Sekarang ini, hanya karyawan terpilih saja yang memegang peranan tertentu yang tetap dipekerjakan oleh perusahaan.

Selain memegang statu ketenagakerjaan tetap, pekerja tambang di lapis pertama juga memiliki upah yang sangat tinggi. Sebagai contoh, operator yang baru masuk saja digaji antara 7.000.000 sampai 10.000.000 per bulan. Angka ini sekitar dua atau tiga kali upah minimum regional. Pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan lapis pertama juga mendapatkan berbagai manfaat seperti cuti yang dibayar, hak istirahat, tunjangan transportasi, asuransi kesehatan swasta, dan kesempatan untuk melakukan pengembangan diri melalui program pendidikan dan pelatihan.

Di tahun 2010, manfaat yang diberikan bahkan lebih lengkap. Pekerja kadang diberikan fasilitas perumahan, layanan transportasi, premi rotasi kerja, akses layanan kesehatan, dan, dalam beberapa kasus, hak istirahat berbayar yang diberikan kepada keluarga mereka¹⁷. Namun manfaat ini sekarang ini tidak tersedia untuk semua karyawan lagi. Hanya beberapa pekerja saja yang diberikan manfaat yang dulu dinikmati oleh seluruh pekerja perusahaan tambang lapis pertama.

Lapis Kedua: Kontraktor yang Terikat dengan Perusahaan Tambang Inti

Bidang usaha di lapis kedua terhubung langsung dengan perusahaan tambang lapis pertama. Ini biasanya kontraktor yang menyediakan barang, jasa, dan tenaga kerja. Misalnya, di Berau dan Sangatta, contoh perusahaan ini adalah PT Pamapersada Nusantara dan PT BUMA.

Pekerja yang bekerja di perusahaan lapis kedua ini biasanya dikontrak waktu tertentu. Salah seorang responden yang bekerja sebagai kontraktor kelistrikan di PT KPC di Sangatta menandatangani kontrak sepanjang tiga tahun. Walaupun ia ditawari kontrak satu tahun oleh perusahaan, ia lebih memilih jaminan atas pekerjaannya dan memilih kontrak yang jangka waktunya lebih lama¹⁸. Dia mendapatkan salinan kontraknya dimana didalamnya tercantum persyaratan ketenagakerjaan, upah, dan manfaat yang diterima.

Di Rawas Ilir, sopir truk sampah yang dipekerjakan oleh PT Ulina Nitra, sebuah perusahaan yang menyediakan alat berat dan layanan penyewaan kendaraan tambang ke PT GP, terikat oleh

16 Percakapan informal dengan Toni, 21 Januari 2025.

17 Misalnya lihat PKB PT Kaltim Prima Coal tahun 2013, bisa diakses di sini: https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perjanjian-kerja-bersama-basis-data/perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-kaltim-prima-coal-dengankorppra-sp-kep-danspk#Pasal_37:_PROGRAM_PERUMAHAN_KARYAWAN

18 Pilihan untuk memilih durasi kontrak kerja merupakan hal yang jarang terjadi. Alasan perusahaan ini mengizinkan calon karyawan untuk memilih durasi kontrak mereka masih belum jelas.

kontrak kerja jangka pendek. Kontrak ini diperbaharui setiap bulan, dimana setiap kontrak isinya kurang lebih sama, hanya berbeda tanggal saja. Salah seorang responden dari Rawas Ilir melaporkan bahwa ia sudah bekerja sebagai sopir truk sampah selama enam tahun berdasarkan pengaturan ini, namun status pekerjaannya tetap kontrak, tanpa transisi ke pekerjaan tetap¹⁹.

Lapis Ketiga: Mendukung Usaha dan Penyedia Layanan

Usaha lapis ketiga menyediakan jasa dan tenaga kerja untuk perusahaan lapis kedua. Di Berau, usaha di lapis ini tidak hanya berbentuk PT namun juga CV, LPM, dan koperasi.

Salah satu perusahaan lapis ketiga yang berbentuk PT adalah PT GA, sebuah perusahaan yang menyediakan personel pengamanan yang kadang disebut satpam. PT GA menugaskan petugas keamanan ini untuk menjaga area tambang yang dimiliki PT BUMA. Stpam ini dikontrak selama satu tahun, yang perbaharui tiap tahun tanpa harus mengajukan. Meskipun sudah bekerja terus menerus selama 7 sampai 9 tahun, banyak dari mereka yang masih berstatus pegawai kontrak dan tidak ditawarkan menjadi karyawan tetap.

Beberapa perusahaan berbentuk CV secara aktif terlibat dalam perjanjian untuk menyediakan layanan dan jasa untuk mendukung operasional pertambangan. Salah satu contohnya adalah CV yang menyediakan persediaan barang-barang logistik dan peralatan kantor habis pakai seperti kertas, printer, dan perabot. Selain menyediakan barang-barang berikut, CV tersebut juga menyewakan kendaraan, khususnya Mitsubishi Triton dan Pajero, kepada perusahaan kontraktor pertambangan untuk digunakan dalam operasionalnya di lapangan.

CV ini beroperasi menggunakan model bisnis dimana mereka berekangan dengan pemilik kendaraan pribadi melalui perjanjian yang spesifik. Di bawah perjanjian ini, CV membayar biaya sewa kepada pemilik kendaraan setiap bulan. Di saat yang bersamaan, mereka mengadakan perjanjian lain dengan perusahaan pertambangan, sehingga bisa dibilang mereka mendapatkan margin sebagai perantara. CV ini juga mempekerjakan beberapa personel termasuk staf administrasi dan pengemudi atau operator kendaraan.

Dikarenakan kontrak antara CV dan kontraktor pertambangan biasanya diperbaharui tahunan, kontrak dengan pemilik kendaraan dan pekerja juga diperpanjang tahunan agar selaras dengan perjanjian utama.

Pada segmen transportasi dari sektor pendukung pertambangan, koperasi memegang peranan penting dalam memobilisasi pekerja tambang. Koperasi ini kadang memiliki perjanjian dengan perusahaan lapis kedua kontraktor pertambangan dan bertanggung jawab dalam menyediakan layanan transportasi dari dan menuju situs tambang. Tentu saja, koperasi ini tidak memiliki

¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, seseorang yang telah bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebanyak tiga kali wajib mendapatkan status pekerja tetap. Namun, dalam praktiknya, di Rawas Ilir, pengemudi truk sampah telah melalui puluhan kali perpanjangan kontrak dan masih tetap diklasifikasikan sebagai pekerja kontrak.

aset berupa kendaraan, jadi mereka mengadakan perjanjian dengan pemilik kendaraan pribadi yang nantinya akan menyediakan kendaraan dan pengemudinya. Perjanjian seperti ini juga biasanya diperbaharui setiap tahun.

Secara terpisah, koperasi mengadakan perjanjian dengan perusahaan kontraktor pertambangan untuk untuk menangani kegiatan bongkar muat batu bara ke kapal tongkang. Koperasi ini menyediakan tenaga kerja yang dikenal sebagai TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat). Koperasi tidak mengadakan perjanjian langsung ketenagakerjaan dengan pekerja individu. Alih alih, mereka berkoordinasi dengan pemimpin regu yang ditunjuk untuk menyatukan tenaga kerja. Setiap regu biasanya terdiri dari 25 sampai 30 orang dan dikerahkan berdasarkan kebutuhan beban kerja dengan penugasan berkisar antara 3 sampai 10 hari tergantung pada volume batu bara yang akan dimuat atau dibongkar.

Lapis Keempat: Sistem Pendukung Ekonomi Batu bara yang Lebih Luas

Jenis usaha di lapis keempat adalah usaha dan tenaga kerja yang mendukung pertambangan secara tidak langsung, biasanya mendukung apa yang dikonsumsi oleh pekerja tambang dan keluarga mereka. Usaha ini tidak memiliki perjanjian yang mengikat dengan usaha lapis atas. Mereka biasanya merupakan bagian ekonomi lokal yang informal.

Beberapa dari usaha ini terhubung langsung dengan kebutuhan konsumsi pekerja tambang, misalnya restoran, kios makanan, toko kelontong, usaha penyewaan rumah, dan ojek. Pekerjaan lainnya seperti nelayan dan petani, hubungannya semakin jauh, dimana produk mereka yang sampai ke pekerja batu bara melalui perantara seperti pasar atau restoran. Hubungan ekonomi seperti ini kadang informal, tanpa adanya kejelasan atau perjanjian tertulis antara pemasok dan produsen.

Penelitian ini sudah mengidentifikasi beberapa kategori dalam lapis keempat:

- **Makanan dan minuman:** Termasuk dalam usaha ini adalah kios makanan, warung minuman, katering rumahan, dan penjual makanan berbasis aplikasi.
- **Transportasi dan pengiriman:** Mencakup seluruh kurir berbasis aplikasi, kurir lokal, dan layanan transportasi berskala kecil.
- **Barang konsumsi:** Toko kelontong dan penjual kebutuhan sehari-hari atau produk perawatan kulit.
- **Pakaian:** Kebanyakan penjual pakaian skala kecil.
- **Perumahan:** Pemilik rumah yang menyewakan kamar atau rumah mereka ke pekerja tambang.
- **Jasa:** Layanan binatu, penyewaan mobil, dan hotel atau penginapan kecil.

- **Produksi makanan:** Nelayan, petani sayur, dan produsen agrikultur kecil lainnya.

Banyak pemilik usaha di lapis ini juga pekerja. Jika mereka dipekerjakan biasanya tidak ada kontrak tertulis, hanya perjanjian lisan saja tentang upah, jam kerja dan tanggung jawab mereka. Rerutmennya pun biasanya informal, mengandalkan hubungan personal dan jarang ada wawancara atau tes kerja.

Di dalam beberapa kasus, khususnya bisnis keluarga, pekerja (biasanya anggota keluarga), tidak dibayar sama sekali dan bekerja tanpa adanya perjanjian formal. Dalam kasus itu, tidak ada hubungan ketenagakerjaan.

Ojek dan kurir online merupakan kasus yang unik. Mereka bekerja untuk platform multinasional dan mereka disebut sebagai 'rekanan', meskipun hubungannya lebih mirip seperti pekerja dan pemberi kerja. Sebaliknya, pengemudi yang bekerja melalui sistem informasi lokal berkoordinasi dengan administrator melalui WhatsApp yang menghubungkan mereka dengan pelanggan. Disinipun tidak ada kontrak antara administrator dengan pengemudi.

3.2 Organisasi dan Perundingan Bersama

Lapis pertama merupakan lapisan yang paling terorganisir. Di lapis tersebut terdapat serikat pekerja. Lapis kedua juga lumayan terorganisir, kecuali di Rawas Ilir. Di sana para pengemudi truk sampah belum membantu serikat. Kurangnya pengorganisasian ini, disatukan dengan kontrak jangka pendek dan kurangnya pengetahuan tentang serikat, menjadikan pekerja hanya memiliki kekuatan negosiasi yang terbatas. Beberapa pekerja kehilangan pekerjaan tanpa penjelasan kenapa kontrak mereka tidak diperpanjang. Isu lain seperti penerapan Pajak Penghasilan (PPh 21) ganda juga menjadi masalah yang tidak terpecahkan karena kemampuan negosiasi pekerja yang sangat terbatas²⁰.

Lapis ketiga biasanya tidak terorganisir. Petugas keamanan dan pekerja yang dipekerjakan oleh CV, termasuk staf administrasi dan pengemudi, tidak membentuk serikat. Terlebih, masalah ketenagakerjaan mereka juga tidak sepenuhnya tercakup dalam studi ini.

Lapis keempat sangat tidak terorganisir. Pemilik dan pekerja sama sama tidak faham tentang serikat dan pengorganisasian secara kolektif. Namin, di beberapa kasus, mungkin dikarenakan kedekatan antara pemilik dan pekerja di usaha kecil, perundingan informal, misalnya untuk permintaan libur, bisa diminta secara langsung dan disepakati.

20 Setiap bulan, perusahaan memotong PPh 21 (pajak penghasilan) dari gaji pengemudi truk sampah. Namun, pada bulan Desember, gaji mereka dipotong lagi untuk PPh 21, dengan jumlah yang setara dengan total pajak penghasilan setahun penuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keakuratan dan transparansi proses perpajakan. Juga masih belum jelas apakah perusahaan benar-benar menyetorkan potongan ini ke kantor pajak, dan jika ya, berapa jumlah yang dibayarkan.

Aspek informalitas di lapis keempat kadang dapat menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih fleksibel dan humanis. Namun ini juga bisa berarti kurangnya perlindungan, pengakuan, dan daya tawar para pekerja yang berkontribusi pada ekonomi batu bara di keseharian mereka.

3.3 Jam Kerja serta Upah untuk Setiap Lapisan

Di lapis kedua, jadwal kerja mengikuti operasional pertambangan batu bara yang dilakukan oleh perusahaan lapis pertama, yaitu sekitar 12 jam per hari. Ada dua shift, yaitu shift siang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dan shift malam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Di setiap shift ada waktu istirahat selama satu jam untuk makan dan sembahyang. Hari tidak bekerja dan hari libur dijadwalkan berdasarkan daftar giliran. Misalnya, supir truk sampah di Rawas Ilir bekerja 6 hari berturut-turut di shift siang, lalu ganti ke shift malam dengan jumlah hari kerja yang sama, diikuti satu hari dimana mereka tidak perlu datang bekerja.

Pekerja di lapis kedua biasanya dibayar sesuai dengan UMK mereka. Namun, karena mereka bekerja lebih dari 8 jam per hari, mereka mendapat lembur sejumlah yang diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu 1.5 kali upah per jam untuk satu jam pertama lembur, lalu 2 kali lipat untuk jam jam berikutnya. Pembayaran lembur ini secara signifikan meningkatkan pendapatan mereka, kadang bisa dua kali lipat UMK.

Di Rawas Ilir, para supir truk sampah kadang menerima antara 6 sampai 7 juta per bulan. Sebagai perbandingan, UMK di Musi rawas Utara di tahun 2024 adalah 3.564.933 rupiah. Angka tersebut sudah termasuk lembur dan bonus. Bonusnya pun bersyarat, yaitu ada target transport yang harus dipenuhi. Gaji mereka ditransfer melalui bank yang digunakan oleh Perusahaan untuk tidak memberikan slip gaji. Sebagai akibatnya, banyak terjadi pengurangan gaji yang kadang tidak diketahui oleh para pekerja. Bahkan Ketika mereka diberikan slip gaji pun kadang tercantum item misterius seperti 'tidak dibayarkan' atau 'absen', bahkan ketika mereka bekerja setiap hari²¹.

Di lapis ketiga, pengaturan kerja sangat bervariasi. Misalnya, petugas keamanan di Berau biasanya bekerja secara terus menerus selama 4 hari diikuti oleh hari tidak bekerja selama 4 hari juga. Namun, jadwal ini bisa berubah kapan saja sesuai dengan keputusan perusahaan. Sebelumnya, mereka memiliki jadwal 5 hari kerja dan 5 hari tidak. Perubahan ini terjadi setelah PT BUMA mulai menghentikan operasinya karena kontrak mereka dengan Berau Coal hampir berakhir. Seperti pekerja lain, mereka bekerja 12 jam sehari dengan waktu istirahat selama 1 jam. Ini artinya dalam sehari mereka lembur 3 jam. Oleh karena lembur tersebut, upah mereka

21 Menurut para pengemudi truk sampah, perusahaan seringkali memotong gaji mereka tanpa alasan atau pemberitahuan. Pemotongan gaji tersebut tertera di slip gaji mereka sebagai "tidak dibayar". Mereka mengatakan bahwa jika tidak dibayar, seharusnya dibayar di beberapa waktu, tetapi tidak pernah dibayarkan kepada mereka. Di waktu lain, pemotongan gaji tersebut tertera sebagai "absen" di slip gaji mereka meskipun mereka tidak pernah absen dari pekerjaan.

hampir dua kali lipat UMK, yaitu sekitar 6.000.000 sampai 7.000.000 rupiah. UMK di Berau itu 3.832.297 rupiah.

Kondisi kerja di sektor transportasi berbeda. Pengemudi mengantar karyawan tambang dari tempat mereka tinggal dan blok pertambangan. Setiap perjalanan pulang pergi memakan waktu dua jam (masing masing satu jam), dan setiap pengemudi biasanya melakukan ini dua kali sehari. Jadi jam kerja mereka itu sekitar 4 jam. Untuk jasa ini, termasuk untuk pengemudi dan kendaraannya, koperasi membayar 8.000.000 rupiah per bulan. Tidak jelas juga apakah pengemudi dipekerjakan secara formal atau dibawah pengaturan yang bersifat rekanan. Ketidakjelasan juga ditemukan terkait siapa sebetulnya pemberi kerja mereka, apakah itu koperasi, pemilik mobil, atau pihak lainnya.

Di lapis keempat, pemilik usaha kecil seringkali tidak bisa mengkalkulasi secara akurat pendapatan mereka. Mereka bergantung pada rata rata dengan pendapatan harian kotor berkisar di angka 300.000 sampai 2.000.000 rupiah dengan pendapatan total per bulan dari angka 4.000.000 sampai 7.000.000 rupiah. Angka ini bisa sangat fluktuatif. Kadang mereka bisa tidak mendapatkan apapun dalam sehari. Penjualan bergantung dari banyak faktor seperti permintaan, cuaca, kesehatan pemilik, bahkan motivasi. Misalnya, seorang pemilik toko pakaian tidur di Berau tutup lebih awal saat ia sedang tidak bersemangat, sehingga mengorbankan potensi pendapatan hariannya. Selama masa kemerosotan ekonomi, penjualan barang-barang yang tidak penting, seperti pakaian tidur, dapat menurun tajam.

Tidak seperti pemilik usaha kecil, pekerja upahan di lapis keempat memiliki pendapatan yang lebih stabil, walaupun lebih kecil. Mereka biasanya mendapatkan sekitar 1.000.000 sampai 2.500.000 rupiah per bulan. Ini masih di bawah UMK di Kutai Timur di tahun 2024, yaitu 3.515.324 rupiah. Mereka juga tidak memperoleh manfaat seperti asuransi kesehatan, tidak ada lembur, dan tidak ada tunjangan makan atau transportasi.

Salah satu kelompok yang masuk dalam lapisan ini adalah pengemudi berbasis platform (misalnya ojek). Pendapatan mereka sekitar 500.000 sampai 4.000.000 rupiah. Untuk mendapat 4.000.000 rupiah, pengemudi harus bekerja sekitar 8 jam sehari, menyelesaikan 15 sampai 20 perjalanan, dan bekerja sekitar 20 hari per bulan. Namun, pendapatan mereka tidak bisa diperkirakan. Mereka bisa hanya menyelesaikan 2 atau 3 perjalanan dalam satu hari dengan penghasilan sekitar 50.000 rupiah.

Jam kerja di lapisan ini sangat bervariasi, tergantung pekerjaannya. Orang-orang kadang harus mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Misalnya Yuli, seorang ibu satu anak, yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, yang mengantar anak-anak tetangga ke sekolah dan juga mencuci pakaian rekan kerja suaminya. Dia tidak tahu berapa jam dia bekerja setiap hari atau berapa pendapatan dari pekerjaannya.

Kios makanan dan minuman di kota tambang biasanya beroperasi 5 sampai 12.5 jam per hari. Kios yang menyediakan sarapan bisa buka sampai siang hari, sementara kios yang menyediakan

makan malam bisa buka dari jam 7 pagi sampai Tengah malam. Waktu ini belum termasuk waktu persiapan. Toko kelontong biasanya buka lebih lama, antara 13 sampai 16 jam per hari. Pekerja transportasi di lapisan ini biasanya bekerja antar 3 sampai 7 jam per hari, kadang sambil melakukan hal lain, misalnya sekolah, Bertani, atau melakukan usaha kecil.

Usaha usaha kecil ini kadang tidak ada libur formalnya. Toko mungkin tutup apabila pemiliknya sakit, atau ada hujan, atau di hari libur agama. Toko kelontong dan pakaian juga polanya sama. Beberapa pekerja transportasi memilih untuk libur di hari minggu agar bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, yang lain memilih bekerja di akhir minggu untuk mendapatkan pendapatan tambahan.

Pola yang sama juga terjadi di pekerja di bidang produksi makanan dan jasa Dimana tidak ada hari libur yang pasti. Mereka hanya tidak bekerja apabila mereka merasa harus. Mereka tidak bisa membedakan dengan jelas hari kerja dan hari tidak bekerja. Misalnya, petani Perempuan di Sangatta, mereka tidak hanya Bertani, namun mereka juga menjalankan bengkel kompos. Para petani Perempuan ini sangat aktif proyek lingkungan desa dan menjual hasil local menggunakan WhatsApp. Kebanyakan pelanggan mereka adalah saudara mereka. Jadi, selagi mereka mengantarkan produk, mereka juga mengunjungi saudara. Karena sangat bervariasi aktifitas petani perempuan tersebut, dia tidak bisa menentukan pendapatan totalnya.

Para nelayan di Sangatta juga memiliki pola hidup yang kurang lebih sama sama tidak terstruktur. Sekali melaut, mereka kadang bisa 5 sampai 10 hari. Ada seorang nelayan yang menyatakan bahwa ia hanya memiliki waktu 3 jam per malam ketika melaut. Sekembalinya melaut, ia menjual hasilnya ke perantara, lalu beristirahat 3 sampai 5 hari sebelum kembali melaut. Sekali melaut, pendapatan yang dikumpulkan bisa mencapai 27.000.000 rupiah, namun ongkos yang dibutuhkan juga besar, untuk bensin, makan untuk tiga orang, pendingin, dan peralatan keamanan.

Meskipun jam kerja sangat panjang dan liburan pun tidak bisa ditentukan, beberapa responden menyebutkan bahwa yang membuat mereka bertahan adalah fleksibilitas. Kebebasan untuk menentukan kapan waktu istirahat, kapan harus bekerja, berapa lama harus bekerja, adalah hal hal yang membuat mereka untuk terus melakukan pekerjaannya dan memilih untuk melakukan usahanya sendiri daripada bekerja di perusahaan. Pekerja dan pemilik usaha kecil di lapis keempat tidak akan mendapatkan apapun apabila mereka tidak bekerja. Jadi, tidak ada kepastian pendapatan, keamanan kerja, atau jaminan sosial. Mereka menanggung seluruh resiko yaitu hilangnya niai ekonomi, kecelakaan, hilang pendapatan, dan resiko kesehatan. Di saat yang bersamaan, mereka juga harus menanggung biaya hidup mereka sendiri dan keluarga mereka.

3.4 Kesehatan Kerja dan Jaminan Sosial

Manfaat jaminan sosial, seperti jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan, biasanya disediakan untuk pekerja di perusahaan lapis pertama dan lapis kedua. Di lapis ketiga, bisa ada, bisa juga tidak. Perusahaan yang memiliki status hukum, misalnya PT atau CV, biasanya memberikan jaminan ini, namun tidak selalu untuk koperasi. Ketidakkonsistenan juga terlihat di ketentuan tentang keamanan dan kesehatan, misalnya dalam hal APD (Alat Perlindungan Diri).

Sebagaimana disebutkan, perusahaan lapis pertama bukanlah fokus penelitian ini. Namun, untuk memberikan perspektif perbandingan terhadap jaminan sosial dari semua lapisan, laporan ini menggunakan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dari tahun 2023-2025 antara KPC dengan tiga serikat pekerja, yaitu PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), SP KEP, dan FPE KSBSI²²—sebagai acuan utama. Analisa dilakukan berdasarkan ketentuan normatif yang diuraikan di PKB, bukan berdasarkan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut data yang akurat tentang implementasi dan cakupan program jaminan sosial di lapis pertama.

Pemerintah Indonesia memandatkan bahwa setiap perusahaan mendaftarkan pekerja mereka ke program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan²³. Sesuai peraturan, perusahaan di lapis pertama mendaftarkan pekerja mereka di kedua program. Selain terdaftar di BPJS Kesehatan, pekerja di perusahaan lapis pertama juga mendapat manfaat tambahan lain seperti asuransi kesehatan swasta dan cakupan medis yang disponsori perusahaan. Manfaat ini mencakup rawat inap di Rumah Sakit, rawat jalan, pemeriksaan medis untuk pekerja dan keluarga mereka.

Untuk perlindungan ketenagakerjaan, pekerja di lapis pertama juga terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jenis BPJS ini mencakup Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Selain manfaat wajib ini, mereka juga mendapat perlindungan tambahan dari perusahaan melalui program Dana Pensiun yang dikelola oleh perusahaan. Di dalam skema ini, karyawan berhak mendapat uang pensiun sampai dengan 10 tahun setelah masa pensiun, dimana jumlah uang yang diterima semakin lama semakin berkurang²⁴. Selain itu, pekerja lapis pertama juga mendapat manfaat lain seperti layanan transportasi, dalam bentuk layanan jemputan dan kendaraan operasional perusahaan, tunjangan makan, dan tunjangan perumahan. Untuk tunjangan perumahan, bisa berupa uang

22 PKB antara PT KPC dan PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), SP KEP dan FPE KSBSI 2023 – 2025, tersedia di <https://anyflip.com/vgwyq/yrwr/basic>.

23 BPJS adalah singkatan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial. BPJS adalah badan pemerintah yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, baik asuransi kesehatan maupun asuransi ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh warga negara Indonesia, sementara BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja terhadap risiko sosial seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

24 Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai jumlah dan durasi manfaat pensiun. Informasi ini diperoleh melalui percakapan informal dengan seorang pensiunan KPC pada tanggal 22 Januari 2025.

tunai atau fasilitas perumahan yang disediakan perusahaan. Mereka juga berhak mendapat bonus tahunan, cuti tahunan, cuti panjang, kesempatan menerima pendidikan atau pelatihan. Penting untuk dicatat bahwa cuti tahunan dan cuti panjang juga diberikan kepada tanggungan mereka, yaitu anak-anak dan pasangannya. Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan pendidikan bagi anak karyawan yang belum terdaftar di sekolah melalui Yayasan Pendidikan yang berafiliasi dengan perusahaan. Pekerja di perusahaan lapis kedua biasanya terdaftar di program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, perusahaan lapis kedua yang lebih besar dan bereputasi, seperti PT Pamapersada Nusantara, menawarkan manfaat kesehatan lain di luar BPJS Kesehatan²⁵. Manfaat ini biasanya mencakup anggota keluarga pekerja dan rawat inap di Rumah Sakit, pengeluaran medis, biaya dokter, dan biaya untuk operasi tertentu. Sebaliknya, banyak perusahaan lapis kedua, misalnya PT DAP di Sangatta, hanya memberikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saja. Diluar kedua program tersebut, pekerja di perusahaan lapis kedua biasanya hanya mendapat tunjangan makan. Tunjangan perumahan dan transportasi tidak disediakan oleh semua perusahaan.

Di perusahaan lapis ketiga, pemberi kerja biasanya mendaftarkan pekerja mereka pada BPJS Kesehatan, dan tidak semua mendaftarkan pekerja mereka di BPJS Ketenagakerjaan. Di penelitian ini, tidak ada satu pun responden yang berasal dari perusahaan lapis ketiga di daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa pekerja mendaftarkan diri pada BPJS Ketenagakerjaan (membayar sendiri iurannya) daripada didaftarkan/dibayarkan oleh pemberi kerja. Di dalam penelitian ini, tidak ada seorang pun dari perusahaan lapis keempat yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Kesehatan, hanya beberapa saja yang didaftarkan dan banyak di antara mereka yang menunggak atau bergantung pada asuransi yang disponsori oleh perusahaan tempat pasangannya bekerja. Bahkan ketika mereka didaftarkan pun, keanggotaannya bersifat BPU sukarela dimana mereka harus membayar penuh keanggotaannya.

Dibawah skema BPU, biaya jaminan sosial cukup signifikan jika dibandingkan pendapatan. Iuran BPJS Kesehatan untuk BPU di tahun 2024 adalah:

- Kelas 3: 42.000 rupiah per orang per bulan
- Kelas 2: 100.000 rupiah per orang per bulan
- Kelas 1: 150.000 rupiah per orang per bulan

Untuk BPJS Ketenagakerjaan skema BPU, iurannya bulanannya berdasarkan pendapatan yang dinyatakan dan termasuk:

- Jaminan Hari Tua (JHT): Rp 20.000 – Rp 414.000

25 PKB antara PT Pamapersada Nusantara dan Serikat Pekerja PT Pamapersada Nusantara 2018 – 2020, tersedia di <https://www.scribd.com/document/443120126/PKB-PAMA-2018-2020>.

Melampaui Tambang: Situasi Ekonomi Berlapis Tambang Batu bara dan Ketergantungan Komunitas Sekitarnya: Sebuah Laporan

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Rp 10.000 – Rp 207.000
- Jaminan Kematian (JKM): Rp 6.800
- Jaminan Pensiun (JP): Tidak tersedia untuk anggota skema BPU

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sendiri ini mengurangi pendapatan riil dan menimbulkan hambatan finansial yang signifikan, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau tidak tetap. Meskipun pemerintah Indonesia memandatkan keanggotaan universal BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, namun di pertengahan tahun 2024, sekitar 16.6 juta orang, atau sekitar 6% populasi belum terdaftar di BPJS Kesehatan²⁶. Selain itu, banyak anggota BPU terancam cakupannya diberhentikan karena pendapatan tidak teratur dan tunggakan pembayaran. Kondisi ini menggarisbawahi betapa rentannya jaminan sosial bagi pekerja informal dan pekerja kelas bawah di sektor pertambangan Indonesia.

Perbedaan kunci antara keanggotaan BPJS antara lapis 1 dan 2, dengan lapis 3 dan 4 adalah jenis keanggotaannya. Pekerja di lapis satu dan dua didaftarkan sebagai penerima upah (PU), dan yang bekerja di lapis tiga dan empat didaftarkan sebagai bukan penerima upah (BPU). Perbedaan ini sangat penting karena menentukan siapa yang membayar iurannya. Tabel di bawah menyimpulkan skema BPJS antara lapis 1 dan 2, dengan lapis 3 dan 4.

Tabel 1. Perbedaan Utama Penerima Upah (UP) vs. Penerima Non-Upah (BPU)

Fitur	Lapis 1 dan 2 (PU)	Lapis 3 dan 4 (BPU)
BPJS Kesehatan	Dibayarkan pemberi kerja (PU) dibayarkan mandiri (di banyak kasus)	
BPJS Ketenagakerjaan	Dibayarkan penuh oleh pemberi kerja	Jarang atau tidak sama sekali
Struktur luran	5% dari upah: 4% pemberi kerja, 1% pekerja	Dibayar pekerja 100%
JHT	3,7% pemberi kerja, 2% karyawan	Tidak tersedia
JP	2% pemberi kerja, 1% karyawan	Tidak tersedia
JKK	0,24%-1,74%, dibayar oleh pemberi kerja	Tidak tersedia
JKM	0,3%, dibayar oleh pemberi kerja	Tidak tersedia

Di saat lapis pertama dan kedua menerima cakupan yang komprehensif dan manfaat manfaat yang di dukung oleh pemberi kerja, pekerja di lapis tiga dan empat menghadapi kerentanan

²⁶ Per 2024, kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 96,8% dari populasi Indonesia, meskipun 58,3 juta pesertanya tidak aktif (yaitu, tidak membayar iuran). Di sisi lain, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah, dengan 40,2 juta peserta pada awal 2025, termasuk 8,99 juta peserta tidak aktif—sebagian besar adalah pekerja bukan penerima upah (BPU).

terkait terbatasnya atau ketiadaan manfaat yang diberikan dan iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

3.5 Pendapatan Rumah Tangga dan Pola Pengeluaran

Bagian ini menghadirkan ikhtisar dari Pendapatan Rumah Tangga dan Pola Pengeluaran yang dikategorikan menjadi tiga tipe utama pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan, pengeluaran non-makanan, dan pengeluaran sosial.

- Pengeluaran untuk makanan adalah semua biaya bulanan untuk keperluan makan termasuk belanjaan untuk keluarga.
- Pengeluaran non makanan termasuk listrik, air, bahan bakar, internet, pendidikan anak, perumahan, pakaian, keperluan perawatan diri, pembayaran pinjaman atau hutang, dan konsumsi rokok.
- Pengeluaran sosial meliputi pembayaran iuran sampah, iuran RT, donasi keperluan agama, dan kegiatan-kegiatan sosial seperti pernikahan, pemakaman, dan kelahiran. Kategori ini juga mencakup pengiriman uang ke keluarga besar.

Selain itu, penelitian ini mencatat tabungan yang mungkin dimiliki oleh Rumah Tangga. Jika mereka memiliki tabungan, kami juga ingin tahu metode apa yang digunakan untuk menabung.

Pendapatan dianalisa berdasarkan sumber dan tipenya, baik itu dari aktifitas usahanya atau upahnya maupun dari fungsinya sebagai pendapatan utama atau sekunder. Jumlah anggota rumah tangga yang menyumbang pendapatan juga dimasukkan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa usaha yang dijalankan oleh pria biasanya merupakan sumber pendapatan utama dan satu-satunya. Sementara, usaha yang dijalankan oleh wanita biasanya sumber pendapatan sekunder. Semua wanita menikah yang menjadi responden penelitian ini merupakan pasangan pria yang dipekerjakan perusahaan tambang lapis kedua.

Satu tantangan yang dihadapi oleh penelitian ini adalah terbatasnya kesediaan data yang terinci tentang pendapatan dan pengeluaran. Responden biasanya melaporkan bahwa mereka tidak membuat catatan keuangan. Laporan pendapatan mereka, apabila ada, seringkali bersifat bruto tanpa pengurangan untuk biaya produksi atau pembayaran upah pekerja. Selain itu, sebagian besar responden tidak mengetahui pendapatan pasangan mereka. Mereka yang hidup dengan orang tua juga kekurangan pengetahuan tentang situasi finansial rumah tangga mereka secara keseluruhan.

Meskipun terdapat batasan, studi ini mampu menarik perbandingan dasar antara pemasukan dan pengeluaran rumah tangga.

Bagi sebagian besar responden, pendapatan mereka tidaklah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Di beberapa kasus, meskipun pendapatan berasal dari kedua pasangan, pengeluarannya masih lebih besar dari pemasukan. Misalnya, Ani, salah seorang responden,

menjalankan usaha makanan rumahan, dan suaminya, yang dipekerjakan oleh perusahaan tambang batu bara di Berau. Pendapatan mereka berdua mencapai 15.000.000 rupiah per bulan. Namun jumlah tersebut masih lebih kecil dari pengeluaran rumah tangga mereka.

Masalah ini tidak hanya dialami karyawan lapisan bawah. Seorang pengemudi truk sampah di Rawas Ilir yang meraih pendapatan sampai dengan dua kali UMK juga mengalami masalah kekurangan finansial. Sebagian besar pendapatan mereka habis untuk rokok dan pembayaran tunggakan. Setiap bulan, mereka menghabiskan sekitar 300.000 sampai 1.500.000 rupiah untuk membeli rokok (kurang lebih sekitar 4.3 % sampai 23 % dari total pendapatan mereka). Sedangkan, untuk pembayaran tunggakan, biasanya untuk cicilan motor atau mobil, mereka mengeluarkan 1.000.000 sampai 7.400.000 juta. Ini bahkan kadang melebihi pendapatan total bulanan.

Penelitian ini tidak dapat menangkap rincian naratif tentang bagaimana cara rumah tangga mengatasi masalah kekurangan finansial ini, termasuk strategi yang mereka gunakan untuk bertahan dalam mengatasi kesenjangan pendapatan tersebut.

Namun, ada juga reponden yang menyatakan bahwa pendapatan mereka melebihi pengeluaran. Mereka adalah:

- Pemilik perusahaan CV dengan omzet per bulan sampai dengan Rp 2 miliar,
- Konsultan independen
- Operator dari usaha penyewaan kendaraan tambang
- Individu yang hidup dengan keluarga tanpa adanya pengeluaran untuk perumahan dan makanan

Termasuk dalam jenis ini adalah wanita yang memiliki usaha kecil dengan suami bekerja di perusahaan tambang batu bara dimana penghasilannya melebihi kebutuhan rumah tangga nya. Ada reponden yang menyebutkan bahwa mereka tidak perlu melakukan pengeluaran untuk makanan dan perumahan dan ada juga yang menyebutkan bahwa di rumah tangga mereka mereka tidak membeli rokok atau membayar cicilan. Selain itu, ada juga beberapa responden yang menyebutkan bahwa mereka memiliki beberapa sumber pendapatan, misalnya melakukan usaha sampingan (memilik kebun kelapa sawit kecil) selain pendapatan utama mereka.

Meskipun memiliki penghasilan yang lumayan besar, banyak rumah tangga di kelompok ini tetap tidak bisa menabung karena kecilnya marjin antara pendapatan dan pengeluaran.

Temuan kunci di semua tingkat pendapatan adalah proporsi yang tinggi dari pendapatan yang dihabiskan untuk makanan. Ini berkisar antara 14% sampai 98% dari total pendapatan. Mayoritas responden menyatakan bahwa pengeluaran untuk makanan lebih dari 50% dari pendapatan rumah tangga mereka. Alasan utama untuk ini adalah makanan harus dibeli dengan uang. Ini karena para responden tidak lagi mencari atau menumbuhkan sendiri makanan mereka. Misalnya, di Rawas Ilir, trennya bergeser dimulai beberapa dekade lalu dengan

kehadiran penjual sayur keliling di kota tambang, menyebabkan hampir seluruh akses pangan pokok menjadi komoditi utama.

Kebanyakan dari mereka yang di wawancara di Berau dan Sangatta bukan berasal dari daerah daerah tersebut. Kebanyakan dari mereka berasal dari daerah lain di Indonesia, utamanya Jawa dan Sulawesi, atau merupakan generasi kedua dari para migran. Banyak dari mereka yang mengirim uang ke kampung halaman mereka untuk mendukung keluarga mereka. Selain dari itu, mereka juga berkontribusi di peristiwa dan tanggung jawab sosial lokal, seperti berdonasi untuk kegiatan keagamaan, biaya desa, dan membantu di acara pernikahan, atau kelahiran di komunitas mereka. Pengeluaran sosial ini biasanya menghabiskan antara 2% sampai 20% dari total pendapatan mereka.

4. Dampak yang Diperkirakan apabila Tambang Ditutup

Sangatta dan tanjung Redeb sangat tergantung pada tambang batu bara untuk kelangsungan ekonomi mereka. Kota kota ini berkembang bersama tambang, dengan berbagai macam usaha kecil dan besar menunjang kehidupan pekerja dan keluarga mereka. Usaha yang dimaksud termasuk usaha transportasi, makanan dan minuman, perumahan dan kebutuhan esensial lainnya, yang menciptakan jejaring yang saling terhubung yang menopang perekonomian lokal.

Konsep ekonomi yang saling berketergantungan ini menjadi sangat jelas pada situasi dimana kontrak sudah berakhir untuk perusahaan lapis kedua di Sangatta, utamanya si situs Bengalon. Walau jumlah pekerja yang diberhentikan tidak tercatat secara rinci, salah seorang warga lokal merasa bahwa desa menjadi jauh lebih sepi ketika kontrak tersebut berakhir. Pekerja yang tetap tinggal mengurangi pengeluaran mereka, dimana ini mempengaruhi pendapatan dari penjual sayur lokal. Selain itu, pekerja yang datang dari luar Bengalon dan Sangatta telah kembali ke kampung halaman mereka, sementara yang lain tetap tinggal.

Di konteks penelitian ini, semua responden adalah mereka yang terkait dengan penambangan, baik langsung maupun tidak. Beberapa orang yang pernah menjadi pekerja tambang kini mulai usaha kecil untuk bertahan hidup, sementara beberapa mampu mengembangkan usahanya dan mulai mempekerjakan beberapa orang. Banyak responden juga memiliki anggota keluarga, seperti pasangan, saudara, dan anak-anak, yang bekerja di tambang. Sementara yang lain, melayani komunitas penambang melalui usaha mereka.

Dampak potensial dari penutupan tambang lebih lanjut ditelusuri menggunakan contoh kadaluarsanya kontrak PT BUMA dengan PT Berau Coal. Kontrak ini akan berakhir di tahun 2025. PT BUMA sudah mulai mengurangi tenaga kerjanya dan menyesuaikan operasionalnya. Di bulan Desember 2024, lebih dari 300 orang sudah dirumahkan, namun efeknya dirasakan oleh 1200 orang, apabila kita mempertimbangkan juga keluarga mereka. Sementara, usaha kecil tidak langsung merasakan akibatnya dimana satu pekerja yang diberhentikan mengaku menunda pembelian yang tidak penting. Meskipun pesangon diberikan sesuai peraturan, pekerja bertanya-tanya bagaimana cara memperpanjang pesangon mereka, dan bisnis apa yang mungkin mereka jalankan di masa mendatang.

Kekhawatiran utama di antara eks pekerja PT BUMA adalah potensi jenuhnya pasar lokal dengan usaha kecil baru. Jika mereka yang dirumahkan membuat usaha baru, persaingan bisa menjadi sangat intens, dan ini menyilitkan usaha baru untuk berkembang, atau bahkan terus berlangsung. Kekhawatiran ini sangat mungkin di Berau, dimana sudah sangat padat usaha disana. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan membeli produk mereka apabila pelanggan utama mereka, yaitu pekerja tambang dan keluarga, sudah tidak ada.

Opsi pemerintah untuk beralih ke produksi kelapa sawit tidak menarik bagi mantan pekerja tambang batu bara dan pemilik usaha kecil di Berau dan Sangatta. Salah satu penghalangnya adalah jauhnya lokasi kelapa sawit dari kota Tanjung Redeb dan Sangatta. Jarak yang jauh ini adalah salah satu penyebab mereka yang sudah biasa dengan kehidupan perkotaan tidak ingin berpindah ke industri kelapa sawit. Selain itu, pekerja yang sudah berumur merasa bahwa pekerjaan di perkebunan kelapa sawit sangat membutuhkan ketahanan fisik yang tinggi. Jika dikombinasikan dengan kesehatan mereka yang semakin menurun, maka pekerjaan itu tidak cocok bagi mereka. Di lain pihak, pekerja muda lebih suka bermigrasi daripada bekerja di sektor kelapa sawit.

Terlebih lagi, upah yang kecil dari industri kelapa sawit telah membuat mereka menolak opsi ini. Meskipun upah minimum kelapa sawit (UMSK) di 2025 dari sektor kelapa sawit telah ditetapkan lebih tinggi dari UMK Kutai Timur, orang Sangatta tetap tidak tertarik. Selain itu, tidak adanya manfaat seperti upah lembur, jaminan sosial, dan kebebasan, pekerja kelapa sawit sangat dibebankan oleh kondisi kerja yang sulit. Banyak pemilik usaha kecil di daerah lebih memprioritaskan kebebasan untuk menentukan waktu kerja mereka, dan ini tidak bisa dilakukan di sektor kelapa sawit.

Faktor penghambat lainnya adalah terbatasnya jumlah pekerja yang diperlukan di sektor kelapa sawit. Lain halnya dengan industri batu bara, yang melahirkan berbagai macam industri pendukung, seperti transportasi, makanan, listrik, dan konstruksi, kelapa sawit hanya memungkinkan terciptanya jenis pekerjaan yang lebih sedikit. Lebih sedikit pekerjaan, semakin sedikit pula aktifitas ekonomi di area sekitar. Ini sama dengan situasi di Rawas Ilir dimana kehadiran London Sumatera sejak 1980an tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tidak seperti di Sangatta dan Tanjung Redeb.

Jadi, upah yang kecil dan jarak yang jauh telah menyebabkan responden berpendapat bahwa memulia usaha dekat perkebunan tidak akan menguntungkan. Mereka berpendapat bahwa menjual barang-barang seperti pakaian dan kue di daerah pedesaan dekat perkebunan tidak akan mendatangkan penghasilan yang sama dengan usaha di daerah perkotaan seperti di Tanjung Redeb atau Sangatta.

Namun, sebagian besar responden tidak melihat adanya hubungan antara penutupan tambang batu bara dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Terlebih, mereka tidak pernah menerima informasi tentang rencana atau kemungkinan penutupan pertambangan di daerah mereka, atau strategi pemerintah untuk transformasi ekonomi paska pertambangan. Di Sangatta dan Berau, responden tidak terlalu khawatir tentang potensi penutupan tambang batu bara. Banyak dari mereka sudah mencoba melakukan usaha kecil dimana beberapa telah mengalami kegagalan karena satu dan lain hal. Jika penutupan tambang batu bara menyebabkan gagalnya usaha mereka, mereka akan mencoba usaha lain di tempat lain.

Di Berau, beberapa responden menyatakan bahwa apabila usaha mereka gagal, atau mereka kehilangan pekerjaan, baik itu karena penutupan tambang atau faktor lain, mereka akan mencoba usaha lain atau melamar pekerjaan lain. Sebagian lain mengaku bahwa mereka tidak memikirkan skenario tersebut atau apa yang harus dilakukan jika itu terjadi.

Sementara itu, di Sangatta, beberapa responden sudah memiliki beberapa opsi usaha yang akan mereka lakukan jika usaha mereka yang sekarang gagal, baik itu karena penutupan tambang atau alasan lainnya. Opsi usaha yang dimaksud termasuk ekspor makanan laut, toko jahit, toko alat pancing, bisnis pakan ternak, persewaan mobil, dan toko kelontong. Banyak opsi usaha ini berkaitan dengan usaha mereka sekarang atau aspirasi jangka panjang yang bisa dilaksanakan apabila memiliki kecukupan modal.

Untuk pemilik dan pekerja usaha kecil di komunitas ini, transisi dari satu usaha kecil ke usaha kecil lainnya adalah biasa. Misalnya, Rais, seorang pria berusia 32 tahun, sebelumnya bekerja sebagai asisten transportasi dan pengupas bawang merah sebelum menjadi pengantar galon di depot isi ulang. Dia sekarang sedang menabung untuk membuka toko kelontong. Serupa dengan Rais, Yuni, seorang wanita berusia 28 tahun, berencana untuk membuka usaha jahit apabila modalnya sudah terkumpul. Sebelum berprofesi menjadi pengemudi ojek online dan penyediaan layanan binatu, dia menjual pakaian dan juga bekerja sebagai staf administrasi di sebuah toko. Ketika ia ditanya tentang penutupan tambang, Yuni lebih khawatir tentang suaminya, yang akan kehilangan pekerjaan sebagai pekerja tambang, dari pada pekerjaannya sendiri. Hal yang sama juga diungkapkan oleh responden yang suaminya bekerja di perusahaan tambang.

Berbeda dengan Tanjung Redeb dan Sangatta, ketergantungan kawasan Rawas Ilir terhadap industri pertambangan lebih kecil. Meskipun daerah tersebut memiliki kawasan operasinal tambang yang lebih terkini dan lebih kecil, industri lain seperti karet dan kelapa sawit sudah lama terbentuk di daerah tersebut. Namun, para pengemudi truk sampah tidak merasa yakin pada industri kelapa sawit dan karet sebagai alternatif dari pertambangan batu bara. Ini karena mereka sangat paham dengan upah yang kecil, kurangnya kebebasan, dan kondisi kerja yang sulit di industri kelapa sawit. Beberapa dari pengemudi itu juga memiliki perkebunan kecil kelapa sawit untuk tambahan penghasilan mereka, namun agar usaha mereka serupa hasilnya dengan bekerja di area pertambangan, mereka membutuhkan lahan kelapa sawit yang lebih besar.

5. Kesimpulan dan Keputusan Strategis untuk Serikat Pekerja

5.1 Temuan Kunci sebagai Bahan Renungan bagi Serikat Pekerja

Studi ini memberikan pemetaan eksploratoris tahap awal dari ekonomi batu bara di Sangatta, berau, dan Rawas Ilir. Penelitian ini juga menghadirkan struktur berlapis dari ketenagakerjaan dan kehidupan masyarakatnya. Lapisan ini dimulai dari lapisan pertama yang menunjukkan struktur ketenagakerjaan yang formal dengan adanya serikat pekerja, sampai dengan lapisan keempat yang sangat informal dengan usaha mikro yang tidak stabil. Meskipun dinamika institusional dan ekonomi penuh dari setiap lokasi masih belum terungkap sepenuhnya, kita bisa mengamati pola-pola lintas sektor tertentu.

Kami juga menemukan bahwa meskipun pekerja di lapisan pertama mendapatkan jaminan dan keamanan yang memadai, banyak pekerja di lapisan 2, 3, dan 4 menghadapi masalah masalah, seperti perjanjian informal, kontrak jangka pendek, pengecualian dari jaminan sosial, dan kurangnya akses untuk bersuara secara kolektif. Banyak dari mereka beroperasi di luar jangkauan kerangka kerja perserikatan pekerja yang berlaku sekarang ini, dan kekhawatiran mereka seringkali tidak diperhatikan dalam diskusi untuk mengembangkan transisi atau kebijakan.

Seiring dengan mulai bergesernya peran batu bara dalam konteks energi nasional, potensi resiko dari komunitas ini, terutama mereka yang pekerjaannya memang tidak stabil, sangat signifikan. Meskipun diperlukan penelitian yang lebih rinci dan terlokalisasi untuk memahami secara menyeluruh kompleksitas di setiap kota, jelas bahwa mobilisasi tenaga kerja memiliki perang yang sangat penting dalam mengorganisir, melindungi, dan mewakili basis pekerja yang secara umum bergantung pada batu bara.

Box 2. Keputusan Strategis untuk Pelibatan Serikat Pekerja

Alih alih menyediakan rekomendasi yang pasti, kami menyediakan saran berdasar prioritas untuk penyelidikan, pengorganisasian, dan eksperimen yang dipimpin oleh serikat pekerja yang responsif dengan kondisi setiap daerah yang terus berubah.

1. Memperluas Pengorganisasian kepada Pekerja Informal dan Kontrak

Temuan awal menunjukkan bahwa pekerja di lapis kedua sampai keempat, meskipun mereka adalah bagian integral dari ekonomi batu bara, kadang tidak terwakili. Serikat pekerja harus mulai mengembangkan model keanggotaan yang inklusif, dan menjangkau pekerja informal dan subkontrak.

2. Mempromosikan Jaminan Sosial ke Pekerja di Seluruh Lapisan

Akses ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sekarang ini tidak merata, terutama untuk pekerja informal. Meskipun terdapat mekanisme inklusif, hal ini tidak digunakan secara baik dan diadaptasi secara buruk di praktiknya. Serikat dapat memulai mendokumentasikan kesenjangan jaminan di setiap lokasi, mendukung usaha pendaftaran berbasis kelompok, dan mengadvokasi jalur akses yang disederhanakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja informal.

3. Terlibat dalam Dialog Transisi Adil Lokal

Setiap lokasi memiliki garis waktu dan lintasan transisi yang berbeda, namun beberapa memasukkan perspektif pekerja di luar pertambangan formal. Serikat dapat memulai dengan membentuk kelompok pemantau transisi, memetakan kerawanan pekerja, dan mengadvokasikan terwakilinya serikat di forum perencanaan lokal. Keterlibatan lebih awal akan memberikan kesempatan berpartisipasi yang lebih bermakna kebijakan transisi mulai terbentuk.

4. Membangun Sistem Dokumentasi dan Dukungan Hukum

Kesadaran dan akses hukum di kalangan pekerja tingkat bawah masih rendah. Serikat pekerja dapat memulai dengan membuat bantuan hukum percontohan atau saluran pengaduan bergerak yang bertugas mengumpulkan laporan pelanggaran tentang pengupahan, persengketaan kontrak, dan klaim kesehatan. Upaya ini akan membantu menciptakan dasar pembuktian yang bisa digunakan untuk kampanye dan perundingan kedepannya.

5. Membina Solidaritas dan Identitas Bersama di Seluruh Lapisan Pekerja

Pada akhirnya, serikat harus memulai membina solidaritas antara pekerja formal dan informal di berbagai lapisan dan kota. Aksi aksi kecil, seperti pertemuan gabungan, wawancara rekan sejawat, kampanye bersama, dapat menjadi dasar bagi identitas buruh yang lebih luas dan inklusif yang mencerminkan tatanan sosial dan ekonomi nyata di kota-kota batu bara.

Source: Author

5.2 Jalur untuk Tindakan dan Pembelajaran Iteratif

Sudah disebutkan bahwa ini adalah studi awal. Oleh karena itu implementasi harus dilanjutkan ke tahap **percontohan**, **kampanye mendengar**, dan **pengorganisasian iteratif**. Berikut adalah tahap-tahap yang disarankan:

- Sesi mendengarkan masyarakat di setiap lokasi untuk menguji arahan ini terhadap kebutuhan lokal.

Melampaui Tambang: Situasi Ekonomi Berlapis Tambang Batu bara dan Ketergantungan Komunitas Sekitarnya: Sebuah Laporan

- Latihan memetakan pekerja untuk memahami dimana dan bagaimana pekerja terkonsentrasi.
- Dokumentasi praktik yang menjanjikan dari koperasi yang ada atau jejaring informal.
- Memantau alat (survei, kanal WhatsApp) untuk membangun data yang didapat dari pekerja guna keperluan advokasi.

Setelah penelitian dan pengorganisasian semakin mendalam, strategi ini bisa diadaptasi dan dibuatkan skala dengan bekerjasama dengan pekerja dan komunitasnya.

5.4 Bahan Renungan

This study does not pretend to offer a definitive blueprint. Rather, it presents a call to action: that unions begin engaging with the full complexity of labor in coal regions—not just those inside the formal workplace gates. By extending solidarity, protection, and collective power across tiers, the labor movement can redefine its role in shaping a just future for all workers.

Daftar Pustaka

- Akbar, Z. (2017, December 30). Warga asal Jawa mayoritas di Kutim. *Bontang Post*. <https://bontangpost.id/warga-asal-jawa-mayoritas-di-kutim/>
- Beraupost. (2024, December 30). Penduduk Berau melonjak, kelahiran dan perpindahan penyebab utama. <https://beraupost.jawapos.com/utama/2445477280/penduduk-berau-melonjak-kelahiran-dan-perpindahan-penyebab-utama>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. (2024). *Kabupaten Berau dalam angka 2024* (Vol. 50). Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=3ewRX>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. (2025). *Produk domestik regional bruto Kabupaten Berau menurut lapangan usaha 2020–2024* (Vol. 11). Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=w0x32>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur. (2024). *Produk domestik regional bruto Kabupaten Kutai Timur menurut lapangan usaha 2019–2023* (Vol. 10). Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=wCgpC>
- Badan Pusat Statistik Musi Rawas Utara. (2024). *Kabupaten Musi Rawas Utara dalam angka 2024* (Vol. 10). Badan Pusat Statistik Musi Rawas Utara. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=g6Sth>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. (2024). *Profil perkembangan kependudukan tahun 2023*. Disdukcapil Kabupaten Berau. <https://disdukcapil.beraukab.go.id/files/DATA%20PROFIL-143-file.pdf>
- Gereffi, G. (2010). The global economy: Organization, governance, and development. In N. J. Smelser & R. Swedberg (Eds.), *The handbook of economic sociology* (2nd ed., pp. 160–182). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400835584.160>
- Insight Kaltim. (2024, July 23). Potensi pendapatan Kutim dibahas: Fokus pada tambang dan sawit. <https://insightkaltim.com/2024/07/23/potensi-pendapatan-kutim-dibahas-fokus-pada-tambang-dan-sawit/>
- PT Kaltim Prima Coal. (n.d.). *Insan KPC*. <https://www.kpc.co.id/id/insan-kpc/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2018, March 8). Menteri ESDM meresmikan excess power PLTU Tanjung Bara dan pabrik pakan ternak PT Kaltim Prima Coal (KPC). <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives>
- Mulyadi, R. (2024, August 8). Berau masih melihat PAD dari sektor tambang. *Radio Republik Indonesia (RRI)*. <https://rri.co.id/>
- Ollman, B. (2003). *Dance of the dialectic: Steps in Marx's method*. University of Illinois Press.
- PKB PT Kaltim Prima Coal. (2013). *Perjanjian kerja bersama antara PT KPC dengan Korppra SP KEP dan SPK*. <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perjanjian-kerja-bersama>
- PKB PT KPC dengan PPMI, SP KEP, dan FPE KSBSI. (2023). *Perjanjian kerja bersama 2023–2025*. <https://anyflip.com/vgwyq/yrwr/basic>

Melampaui Tambang: Situasi Ekonomi Berlapis Tambang Batu bara dan Ketergantungan Komunitas Sekitarnya: Sebuah Laporan

Radar Kutim. (2023, August 21). Kinerja KPC diapresiasi Isran, dukung royalti dan pajak tembus Rp112T. <https://radarkutim.com/kinerja-kpc-diapresiasi-isran-dukung-royalti-dan-pajak-tembus-rp-112-t/>

Wicaksono, A. (2024, October 31). Inilah 10 daerah perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. *Metro TV News*. <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzqzp-inilah-10-daerah-perkebunan-kelapa-sawit-terluas-di-indonesia>

Zahrotul, M. (2023, January 9). 5 daerah penghasil karet terbesar di Sumatera Selatan. *iNews Sumsel*. <https://sumsel.inews.id/berita/5-daerah-penghasil-karet-terbesar-di-sumatera-selatan>

Just Energy Transition in Coal Regions